

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Papua merupakan wilayah Indonesia bagian timur yang secara geografis terletak berdampingan dengan wilayah negara-negara di Kepulauan Pasifik yang memiliki kesamaan rumpun melanesia. Rumpun melanesia merupakan kelompok etnis yang terdiri dari berbagai suku bangsa di wilayah Pasifik Selatan, termasuk Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, New Caledonia, dan Fiji, yang terkenal dengan keanekaragaman bahasa, budaya, dan tradisi mereka. Keanekaragaman yang luar biasa dalam bahasa, budaya, dan tradisi, dengan ratusan bahasa yang digunakan, berbagai praktek budaya unik, dan tradisi yang mendalam yang mencerminkan interaksi kompleks antara manusia dan lingkungan mereka sepanjang sejarah. Interaksi kompleks antara manusia dan lingkungan dalam Rumpun Melanesia mencakup berbagai aspek seperti adaptasi budaya terhadap kondisi geografis, penggunaan sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari, dan dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem setempat.

Secara geopolitik, Papua terletak di wilayah Pasifik, namun secara administratif, Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini menciptakan dilema mengingat adanya perbedaan signifikan dalam suku, bahasa, dan kebudayaan. Indonesia, dengan lebih dari 700 bahasa daerah (Meguro, 2019) dan beragam suku, menawarkan keragaman budaya yang signifikan dan mencakup tradisi, seni, dan masakan yang unik. Meski demikian, sebagai negara yang dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia menghargai dan mengakui keragaman suku, bahasa, kebudayaan, dan agama yang dimiliki oleh seluruh rakyatnya, termasuk penduduk Papua. Keberagaman masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menjadikannya sebagai negara dengan pluralisme budaya. Keragaman suku, bahasa, agama, dan budaya, Indonesia mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsanya, menjadikan perbedaan sebagai ciri khas, bukan penghambat, yang memperkaya identitas negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara multi etnis telah menciptakan identitas bangsa melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pemersatu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu merupakan bahasa resmi yang mengikat penduduk bersama-sama. Selain itu Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat yang efektif untuk digunakan dalam semua

domain resmi, meskipun tidak selalu menggantikan penggunaan bahasa ibu lainnya di bidang komunikasi yang lebih informal (Simpson, 2023). Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional digunakan oleh media massa, dalam percakapan formal, di semua jenjang pendidikan, dan dalam bahasa tertulis (Immanuel et al., 2024). Sekitar 270 juta penduduk, antara 23 juta dan 43 juta adalah penutur Bahasa Indonesia dibandingkan dengan lebih dari 84 juta penutur bahasa Jawa, bahasa daerah yang sebagian besar digunakan di pulau Jawa (J. Jap & Tiatri, 2024).

Identitas bangsa Indonesia juga tercermin melalui aspek budaya seperti dalam seperti misalnya masyarakat Sunda melalui budaya *leuit* sebagai simbol identitas agraria (Kurniawan & Aprilian, 2024). Identitas agraria menggambarkan kegiatan pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat pada suatu lahan dan juga berperan sebagai identitas budaya yang diturunkan secara turun temurun (Villalba-Eguiluz et al., 2023). Misalnya, Identitas budaya masyarakat Bali tercermin dengan jelas dalam pengelolaan aktivitas pertanian mereka (Adhika & Putra, 2021). Oleh karena itu, kepemilikan tanah secara eksplisit merefleksikan identitas budaya dan etnik sebuah masyarakat, sebagaimana tanah tersebut merupakan lokasi tempat mereka berdomisili (Chou, 2009).

Identitas bangsa Indonesia juga tercermin melalui gambaran masyarakat sebagai masyarakat maritim, yang menganggap laut sebagai unsur profan tetapi juga sebagai sesuatu yang sakral. Tradisi dan ritual yang berkaitan dengan laut merupakan tanda penghormatan mereka terhadap laut (Hartati et al., 2020). Masyarakat maritim Indonesia mengandung berbagai nilai religiusitas yang diwariskan, termasuk mitos, legenda, cerita rakyat, dan tradisi lisan tentang kosmologi laut. Cerita rakyat, mitos, dan legenda memiliki posisi penting dalam masyarakat, tidak hanya mengacu pada tradisi budaya tetapi juga mengandung nilai-nilai agama atau teologis yang erat kaitannya dengan identitas bangsa Indonesia (Kristianto et al., 2024). Dengan demikian, agama tradisional telah memainkan peran penting, baik dalam identitas etnis kelompok secara keseluruhan, maupun dalam identitas lokal penduduk desa dan dusun tertentu (Chernykh, 2024).

Aspek terpenting dalam menentukan identitas nasional Indonesia adalah ideologi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis. Ideologi ini menjadi landasan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada (Rahawarin, 2021). Secara historis, Pancasila muncul dari gagasan mengenai keberagaman bangsa Indonesia yang bertujuan untuk membentuk sebuah negara dengan ideologi yang selaras dengan identitas budaya nasional (Bourchier, 2014). Pancasila adalah falsafah dan ideologi yang menjadi dasar kehidupan

berbangsa dan bernegara bagi Indonesia. Fungsinya tidak hanya sebagai cita-cita dan aspirasi bangsa, tetapi juga sebagai manifestasi dari rasa nasionalisme yang mendalam di kalangan masyarakat Indonesia (Setiyono & Natalis, 2023).

Meski Indonesia telah mengukuhkan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, prinsip-prinsip primordial masih saja tampak dalam masyarakat. Primordialisme, menurut para ahli seperti (Tussupbekov et al., 2024), merupakan orientasi sosial yang menekankan pada loyalitas seseorang terhadap suku, agama, atau etnisnya. Penelitian oleh (Varshney, 2002) menunjukkan bahwa hubungan antaretnis sering kali bersifat kompetitif dan konflikual, karena prinsip-prinsip primordial ini. Prinsip-prinsip ini sering kali menghalangi upaya pembangunan nasional dan integrasi sosial. Menurut (Pollard-Wright, 2020) primordial merupakan perasaan yang muncul melalui otak sehingga membuat individu dapat membuat gambar dan menandai momen pertama subjektivitas saat berpikir. Perasaan primordial ini oleh (Purdey, 2006), dijelaskan sebagai perasaan "kita" melawan "mereka", yang berasal dari identitas primordial. Identitas primordial menurut (Kumarasamy et al., 2024) berasal dari ikatan darah, bahasa, teritorial, dan agama. Ikatan-ikatan primordial tersebut selanjutnya oleh (Durmuş, 2019) dipandang sebagai identitas individu yang terbentuk berdasarkan kelompok sosial (seksual, ekonomi, ras, etnis, agama, politik, dll.).

Primordialisme, atau dikenal juga sebagai ideologi etnis, memegang peranan penting dalam memperkuat solidaritas etnis di Indonesia, berlandaskan kepada nilai-nilai kultural, polarisasi etnis, serta dominasi Islam (Haridison & Alfirdaus, 2024). Ideologi etnis bangsa Indonesia tercermin dari lebih tiga ratus kelompok etnis, yang tersebar di sekitar enam ribu pulau berpenghuni dengan perbedaan agama, bahasa, dan budaya yang signifikan. Meskipun sebanyak 88% penduduk Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut Islam, komunitas Muslim di negara ini mengalami perpecahan yang mendalam, tidak hanya dalam hal orientasi teologis, tetapi juga dalam ideologi politik (Hefner, 2018). Pada periode 1930-an hingga awal 1980-an, Indonesia masih memperdebatkan ideologi politik dimana politik kiri yang disponsori oleh partai sosialis dan komunis paling aktif dan signifikan (Hewison & Rodan, 2012).

Periode yang bersamaan, mulai dari tahun 1950-an hingga 1960-an, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan integrasi Papua. Salah satu isu utama yang mengemuka dalam proses integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan digaungkannya politik identitas. Menurut (T. Y. Sari & Silalahi, 2024), di Indonesia identitas etnis sering di politisasi dalam berbagai bentuk mulai dari aturan pemilu, ideologi

partai politik, demografi etnis, dan norma sosial. Politisasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu seringkali menurut (Todorova, 2023) disertai dengan tujuan-tujuan tertentu termasuk didalamnya adalah radikalisme. Politisasi identitas etnis di Papua dapat dipahami sebagai proses membangun kesadaran pada masyarakat Papua terkait identitas etnis mereka, serta menyadarkan akan perbedaan rasial antara orang Papua dengan etnis lainnya di Indonesia.

Secara fisik, orang Papua seringkali dikenal melalui ciri-ciri seperti rambut keriting dan warna kulit yang gelap. Karakteristik ini seringkali menjadi stigma yang menimbulkan perasaan adanya perbedaan rasial diberbagai lingkungan sosial (Sianturi et al., 2022). Persepsi perbedaan rasial yang dialami oleh masyarakat Papua seringkali menghambat kemungkinan mereka untuk menerima dan mengembangkan relasi yang lebih dalam dengan individu dari kelompok non-Papua. Politisasi identitas etnis yang terjadi pada tahun 1950-an hingga 1960-an telah menyebabkan stereotip yang melekat pada orang Papua yang bertahan hingga saat ini. Stereotip yang melekat kepada orang Papua meliputi identitas etnis yang sengaja dimainkan untuk menepis identitas bangsa Indonesia yang mulai dibangun dalam bingkai NKRI.

Isu pertama yang dikemukakan dalam membangun solidaritas etnis Papua adalah persepsi bahwa Indonesia berperan sebagai penjajah (Woodman, 2023). Isu penjajahan yang dituduhkan kepada Indonesia terhadap Papua disebabkan pada kegagalan pembangunan di wilayah tersebut. Banyak warga Papua beranggapan bahwa kehadiran Indonesia di Papua hanya untuk eksploitasi kekayaan secara eksklusif tanpa kesejahteraan dan pembangunan masyarakat setempat (Webb-Gannon, 2023). Isu tersebut semakin menguat karena dipicu oleh perbandingan kondisi sosial masyarakat Papua pada masa penjajahan yang ironisnya memiliki kualitas hidup yang lebih baik, terutama dalam sektor pendidikan (Kooijman, 2024). Sektor ekonomi dalam konteks lainnya, pemerintah Belanda telah menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat pribumi. Implementasi sistem ini memunculkan perbedaan yang mencolok dalam cara pandang orang Papua terhadap pemerintahan Indonesia dalam menangani isu ekonomi lokal (Conroy, 2023).

Isu kedua yang dikemukakan dalam membangun solidaritas etnis Papua adalah diskriminasi rasial. Stereotip yang melekat kepada diskriminasi rasial ini lebih kepada eksploitasi tradisi kuliner, tanaman, dan teknik masak dari orang-orang terjajah yang oleh (Chao, 2022) disebut sebagai *gastrokolonialisme*. Penggantian pati sagu dengan beras sebagai menu sehari-hari masyarakat Papua didasari oleh persepsi bahwa pengelolaan sagu

sebagai makanan pokok dianggap kurang sehat dan bergizi. Konsumsi pati sagu yang merupakan kebiasaan masyarakat setempat, dianggap kurang baik dan perlu diganti dengan alternatif lain seperti beras yang dinilai lebih memberikan kesehatan dan gizi yang baik.

Perlakuan diskriminasi yang bertajuk *gastrokolonialisme*, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang kontroversial dengan mengeksploitasi sumber daya alam terutama pengambilalihan hutan-hutan sagu yang merupakan bagian dari tanah-tanah adat. Tujuan *gastrokolonialisme* semakin diperjelas melalui implementasi program transmigrasi, yang mengatur pemindahan penduduk miskin dari pulau Jawa ke Papua, disertai dengan konversi hutan alami menjadi perkebunan kelapa sawit, yang menunjukkan upaya sistematis untuk mengubah struktur sosial dan lingkungan di Papua (Budiardjo & Carmel, 1983). Upaya-upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah telah mengubah struktur dan fungsi hutan didalam konteks tatanan adat istiadat masyarakat Papua. Tanah-tanah yang mereka huni bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai tempat bagi ekspresi budaya masyarakat adat Papua. Tindakan tersebut menyebabkan dampak negatif berupa isolasi terhadap masyarakat Papua di wilayah yang telah mereka tempati secara turun-temurun.

Isu ketiga yang dikemukakan dalam membangun solidaritas etnis di Papua berkaitan dengan kebebasan dalam mengembangkan seni budaya yang berkaitan dengan tradisi masyarakat setempat. Seni budaya bagi masyarakat Papua bukan hanya sekedar praktik estetis, melainkan representasi dari jati diri serta simbol-simbol adat yang merefleksikan kebebasan mereka sehubungan dengan tempat dimana mereka tinggal (Burridge & Nielsen, 2017). Seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat Papua dalam tradisi mereka menggambarkan hubungan budaya yang erat dimasa lalu, yang merupakan manifestasi dari kepercayaan mereka terhadap berbagai ritual yang dilaksanakan (Shaw & Langley, 2017). Pembatasan kebebasan berekspresi dalam seni dan budaya, terutama yang terkait dengan pelaksanaan ritual kepercayaan, kerap kali dipengaruhi oleh isolasi terhadap lokasi alam yang dianggap sebagai pusat pelaksanaan ritual tersebut. Isolasi ini menghalangi komunitas masyarakat Papua dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya yang telah turun-temurun.

Politisasi identitas etnis di Papua telah membentuk solidaritas etnik yang menyatukan masyarakat Papua, meskipun pada kenyataannya terdapat lebih dari 250 suku dengan bahasa yang berbeda-beda diwilayah tersebut. Solidaritas etnis ini berkaitan dengan identitas kepapuaan yang maknanya sama dengan rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. (Putra et al., 2024) dalam *International Journal of Intercultural Relations*

menemukan bahwa mayoritas orang Indonesia memperlakukan dan memandang negatif orang Papua. Kekhawatirannya adalah, jika Papua memang dianggap sebagai bagian dari Indonesia, dan orang Papua juga disebut orang Indonesia, maka mereka meminta untuk diperlakukan sama seperti warga negara lainnya. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap kekurangan yang terjadi di masa lalu, kejadian-kejadian tersebut telah berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan solidaritas etnisitas Papua.

Permasalahan yang dihadapi dengan solidaritas etnisitas Papua yang ketika dihadapkan pada nasionalisme Indonesia, yang dibangun berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia, kerap menimbulkan pertentangan. Permasalahannya adalah bukan karena Pancasila atau UUD 1945 yang tidak mengakomodir solidaritas etnisitas Papua, tetapi menurut (Kueh, 2023) terdapat rasa nasionalisme yang kompetitif yang menyatukan sekelompok besar orang di Pulau Jawa, namun pada saat yang sama nasionalisme tersebut juga cenderung memarginalkan beberapa etnis lain, termasuk Cina, Aceh, dan Papua. Program-program modernis yang ambisius berupaya untuk merekonstruksi negara Indonesia sesuai dengan citra yang berpusat di pulau Jawa. Hal ini telah memicu konflik antara berbagai kelompok etnis di Indonesia, menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya memperkokoh kesatuan nasional.

Secara khusus di Papua, konflik yang terjadi sejak tahun 1960-an hingga saat ini sebagai rangkaian konflik yang berasal dari kegagalan adaptasi solidaritas etnisitas Papua yang oleh (Meteray, 2012) menyebutnya sebagai nasionalisme Papua kedalam nasionalisme Indonesia sebagai satu bangsa yang kaya akan keberagaman etnis. Nasionalisme Papua telah tumbuh dan berkembang berdasarkan identitas masyarakat Papua yang memiliki ciri khas fisik seperti kulit hitam dan rambut keriting. Sementara itu, nasionalisme Indonesia secara keseluruhan berpedoman pada semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menekankan pada persatuan dalam keberagaman. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1962, Indonesia belum sepenuhnya berdaulat di Papua. Akibatnya, pengaruh nasionalisme Indonesia belum dapat sepenuhnya diterima di Papua selama periode tersebut. (Meteray, 2012) dalam penelitiannya terungkap bahwa identitas kepapuaan telah ada terlebih dahulu sebelum identitas keindonesiaan sejak tahun 1927

melalui pendidikan dan agama Kristen ketika anak Papua dari berbagai wilayah disekolahkan di Merauke dan disponsori pastor beragama Kristen.

Penggunaan istilah “nasionalisme Papua” dalam konteks ini mengacu pada politisasi identitas yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Politisasi identitas etnis Papua yang diinterpretasikan sebagai nasionalisme Papua sebenarnya merupakan penyelewengan dari makna asli solidaritas etnisitas Papua itu sendiri. Solidaritas etnisitas Papua sendiri sebenarnya adalah merupakan identitas etnis yang berakar pada kepercayaan masyarakat Papua tentang “kebebasan” yang oleh (Strelan & Godschalk, 1989) dalam catatan sejarahnya menyebutnya sebagai *cargo cult*. Kepercayaan tentang kebebasan tersebut diwujudkannyatakan dalam bentuk upacara magis dengan tarian yang dilakukan sepanjang malam. Upacara magis tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menantikan kedatangan sang *konor* yang akan membebaskan mereka dari penderitaan. Kepercayaan terhadap kebebasan ini telah ada di Papua jauh sebelum kehadiran agama-agama modern di Papua. Agama modern seperti Kristen baru mencapai Pulau Papua di tahun 1855, hal ini bagi orang Papua dimaknai sebagai momen lahirnya peradaban baru. Namun masuknya agama Kristen membawa perubahan terhadap tradisi lokal, termasuk pembatasan terhadap perayaan magis, yang kemudian dipertegas oleh Pemerintah Belanda, sehingga membentuk “dialektika antara tradisi lama dan pengaruh agama baru tersebut”.

Perlawanan masyarakat Papua untuk pencapaian kebebasan dalam praktik kepercayaan mereka telah berlangsung sejak masa penyebaran agama kristen hingga pemerintah Belanda memberlakukan pembatasan terhadap pagelaran upacara-upacara magis. Kebijakan yang diterapkan oleh kolonial Belanda tersebut berujung pada isolasi masyarakat Papua terhadap lingkungan alam yang menjadi tempat mereka untuk menyelenggarakan ritual-ritual adat tersebut (Schoorl, 2001). Gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Papua selanjutnya mengalami proses transformasi nilai menjadi gerakan perlawanan yang berbau politik. Gerakan-gerakan perlawanan yang berbau politik tersebut dimulai sejak integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 1963 dan terus berlanjut hingga saat ini, gerakan-gerakan perlawanan di Papua sebagai tanggapan terhadap penantian kebebasan yang hakiki yang mereka nantikan. Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Papua oleh Pemerintah Indonesia tersemat stigma separatis yang ingin menuntut “kemerdekaan Papua”, yang sebenarnya merupakan penyelewengan dari makna sesungguhnya. Sebagai respon, pemerintah Indonesia melakukan tindakan antisipatif

dengan pendekatan represif, yang pada akhirnya menimbulkan konflik berkepanjangan. Hingga saat ini, konflik tersebut belum dapat diatasi secara tuntas oleh pemerintah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dikatakan bahwa konflik sosial dan politik yang terjadi di Papua telah menjadi isu-isu nasional maupun internasional. Konflik tersebut telah berlangsung sejak tahun 1969 hingga saat ini dan masih menjadi tantangan bagi seluruh entitas bangsa. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, munculnya gerakan perlawanan (konflik) yang terjadi di Papua disebabkan oleh adanya keinginan masyarakat untuk “merdeka”. Keinginan untuk merdeka dalam tanda petik merupakan suatu persepsi etnisitas yang terbentuk dari kepercayaan tradisioanl masyarakat di Papua. Persepsi etnisitas dan makna kebebasan tersebut selanjtnya membentuk perspektif masyarakat terhadap dinamika konflik. Menurut Anthony D. Smitth secara eksplisit mengemukakan hipotesis etnis-sebagai-awal kebangkitan nasionalisme. Smith membuat kasus untuk kontribusi etnisitas terhadap nasionalisme dalam bukunya *The Ethnic Origins of Nations* (Smith, 1987), di mana ia membahas masalah pergeseran dari kesetiaan dan identifikasi etnis ke suatu bangsa. Smith menekankan pada keterkaitan kebangsaan dan pemahaman kebangsaan di satu sisi, dan kesetiaan (loyalitas) dan identifikasi etnis di sisi lain.

Berdasarkan permasalahan diatas tentunya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana persepsi etnisitas masyarakat Papua dan kebebasan terhadap dinamika konflik? Pertanyaan ini menjadi topik utama dari penelitian ini sehingga dapat di bagi kedalam beberapa sub-sub pertanyaan yang mempertanyakan hubungan sebab akibat. Adapun sub-sub pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi etnisitas masyarakat Papua?
2. Bagaimana makna kebebasan masyarakat Papua?
3. Bagaimana perspektif masyarakat Papua terhadap dinamika konflik sosial?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan persepsi etnisitas Papua yang lahir dari makna kebebasan masyarakat Papua yang merupakan nilai-nilai kepercayaan yang dianut mereka. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengungkapkan perspektif masyarakat Papua yang terbentuk berdasarkan persepsi etnisitas dan makna terhadap

dinamika konflik. Penelitian ini juga dilakukan untuk membangun kesepahaman diantara semua entitas di Indonesia baik entitas politik, sosial, ekonomi, pihak keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI terhadap penghormatan identitas diri orang Papua sebagai bagian dari Indonesia. Terdapat dua hal yang sangat berpengaruh dan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat di Papua adalah adat dan agama, oleh sebab itu nilai-nilai adat dan agama mendapat perhatian yang cukup besar. Adat dan agama menjadi begitu dihormati sehingga dianggap sakral, siapa pun tidak diperkenankan untuk melecehkan kedua hal itu. Aliran kepercayaan tradisional Papua sesungguhnya merupakan sarana untuk mengungkapkan jati diri orang Papua yang salah diartikan dalam makna politik sehingga sulit diterima dalam ideologi Pancasila.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis persepsi etnisitas masyarakat Papua.
2. Untuk menganalisis makna terhadap kebebasan masyarakat Papua.
3. Untuk menganalisis perspektif masyarakat Papua terhadap dinamika konflik sosial.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diperlukan karena dapat bermanfaat secara teoritik maupun secara praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara akademis diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu sosiologi secara khusus pengembangan teori.
2. Secara praktis diharapkan bahwa penelitian ini menjadi acuan atau rujukan dalam perumusan kebijakan Pembangunan.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini melingkupi beberapa aspek penting sebagai upaya dalam memahami persepsi etnisitas dan kebebasan yang mempengaruhi dinamika konflik sosial di Papua. Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi beberapa point utama yang menjadi topik dikaji yaitu:

1. Persepsi etnisitas terkait bagaimana masyarakat Papua mempersepsikan etnisitas mereka dalam konteks sosial serta aspek-aspek apa saja yang membentuk persepsi etnisitas Papua. Pengumpulan data dilakukan terkait dengan identitas etnik dan nilai-nilai etnisitas yang dipegang oleh masyarakat.
2. Makna kebebasan bagi individu dan kelompok terkait pemahaman konsep kebebasan, baik dalam konteks sosial budaya maupun politik. Pemahaman makna kebebasan

diperlukan untuk memperjelas makna sesungguhnya dari tujuan kebebasan yang diharapkan oleh masyarakat Papua. Pengumpulan data dilakukan terkait dengan nilai-nilai kebebasan yang dipegang oleh masyarakat serta implikasinya terhadap hubungan antar kelompok suku-suku di Papua maupun antar kelompok etnis lainnya.

3. Dinamika konflik sosial dengan memperhatikan faktor etnisitas dan kebebasan sebagai pemicu atau pemoderasi konflik. Pengumpulan data dilakukan terkait dengan periodisasi terjadinya konflik di Papua.

F. KEBARUAN PENELITIAN

Kebaruan dari penelitian ini tentunya dapat dilihat dari berbagai penelitian terdahulu yang telah di publikasi dalam berbagai jurnal internasional yang terindeks scopus. Tren publikasi ilmiah tentang konflik etnis mencakup beragam jenis dokumen yang terdapat di website, seperti jurnal, prosiding, buku, bab buku, dan catatan kuliah, yang kesemuanya telah dianalisis dalam penelitian yang telah dikumpulkan 2013 hingga 2023 terdiri dari 5,427 publikasi, disusul oleh book chapter yang berjumlah 1,357. Dimana penelitian-penelitian ini secara global membahas terkait konflik etnis yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti misalnya konflik Timur Tengah, konflik Rohingnya, konflik etnis yang terjadi di Thailand dan konflik etnis yang terjadi di Kalimantan serta berbagai konflik etnis lainnya.

Sejauh ini penelitian mengenai konflik etnis di Papua berdasarkan penelusuran data base scopus dengan menggunakan kata kunci "konflik etnis Papua" ditemukan 5 artikel yang terkait dengan konflik di Papua. Penelusuran penelitian ataupun publikasi terkait konflik etnis melalui google scholar menemukan 3 artikel yang membahas terkait konflik etnis Papua. Penelitian yang dilakukan oleh (Ananta et al., 2016) *Statistics on Ethnic Diversity in the Land of Papua, Indonesia* penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi secara kuantitatif keragaman etnis di Tanah Papua, dengan arus masuk migrasi yang besar dan meningkatnya pergerakan berbasis etno. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Tanah Papua secara etnis sangat heterogen, tetapi tidak terpolarisasi. Papua Barat lebih heterogen, sedangkan Papua lebih terpolarisasi. Namun, hal ini tidak mengubah kemungkinan intensitas konflik etnis, yang mengindikasikan bahwa konflik etnis harus diantisipasi setiap kali membuat program yang melibatkan migran atau membujuk masyarakat untuk bermigrasi ke Tanah Papua. Proses desentralisasi sejak 1999 di Indonesia telah membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat, tetapi juga mendorong meningkatnya jumlah kebijakan "berpusat pada kabupaten", yang mengarah

pada peningkatan kesadaran akan identitas etnis dan memengaruhi hubungan antara keragaman etnis dan pembangunan di wilayah tersebut.

Penelitian ini juga dilakukan dengan meneliti kondisi demografi Tanah Papua, menemukan bahwa populasinya relatif rendah, dengan kepadatan penduduk yang rendah dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, migrasi ke Tanah Papua bukanlah masalah baru dan telah terjadi jauh sebelum kedatangan orang Eropa, dengan orang Jawa menjadi kelompok migran paling dominan di wilayah tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa orang Jawa memainkan peran penting dalam membentuk komposisi etnis di Tanah Papua dan merupakan kelompok etnis terbesar di empat wilayah di Papua. Selain itu, penelitian ini meneliti pengaruh migrasi terhadap keragaman etnis, menemukan bahwa migrasi dalam mungkin telah meningkatkan kemungkinan konflik etnis di Tanah Papua, tetapi tidak berkontribusi secara signifikan terhadap intensitas konflik.

Etnisitas Papua sendiri, menurut Bernada Meteray, 2012 dalam penelitian tentang Nasionalisme Ganda Orang Papua menyimpulkan bahwa nasionalisme Papua memiliki basis pada identitas ras melanesia, yang dikenal sebagai kulit hitam dan rambut keriting, berbeda dengan nasionalisme Indonesia yang mengadopsi semboyan Bhineka Tunggal Ika, dimana keragaman suku, ras dan budaya dihargai tanpa didasarkan pada ras tertentu. Proses nasionalisme Indonesia di Papua berlangsung melalui jalur yang berbeda di bandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Periode 1945 – 1962, Pemerintah Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk secara terbuka menumbuhkan nasionalisme Indonesia di Papua, menyebabkan proses tersebut tidak tuntas terlaksana sepenuhnya. Setelah tahun 1963, upaya pengindonesiaan di Papua dilakukan dengan metode yang lebih paksa dan keras. Kesulitan dalam membangun kesadaran masyarakat Papua sebagai bagian integral dari Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan terhadap identitas keindonesiaan merupakan hal yang kompleks. Penelitian ini menegaskan bahwa identitas kepapuaan telah terbentuk lebih dahulu dan lebih kuat dibandingkan identitas keindonesiaan di wilayah tersebut.

Penelitian tentang etnisitas Papua juga dilakukan oleh Avelinus Lefaan, 2021 tentang *Identity Politics And The Future Of Democracy In Papua*. Studi tersebut mengkaji bagaimana identitas etnis dan kebangsaan yang sangat beragam di Papua, telah digunakan sebagai alat dalam politik lokal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap proses demokrasi. Ia menganalisis bagaimana dinamika identitas, termasuk agama dan isu-isu regional dalam membentuk landscape politik di Papua. Salah satu temuan kunci dari studi

ini adalah bahwa politik identitas di Papua seringkali tidak hanya mencerminkan perjuangan aspirasi lokal namun juga refleksi dari konflik sosial dan ekonomi yang lebih luas. Politik identitas, seperti yang ditunjukkan dalam studi ini, seringkali digunakan oleh elit politik untuk memobilisasi pendukung dan mendapatkan kekuasaan, yang bisa merusak integritas proses demokratis.

Makna kebebasan yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Hanita, 2019 yang mengkaji tentang konsep cita-cita "*Koreri*" yang merupakan bagian penting dari kepercayaan dan budaya masyarakat Biak di Papua. *Koreri*, yang secara harfiah berarti "datang lagi" atau "kembali", merujuk pada kepercayaan akan datangnya zaman keemasan dimana kemakmuran, kedamaian, dan keadilan akan terwujud di tanah Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Koreri* bukan hanya sekedar harapan atau impian, tetapi juga menjadi pendorong bagi masyarakat Biak untuk bertindak dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam politik, sosial, dan keagamaan. Cita-cita *Koreri* telah terintegrasi dengan kuat dalam identitas dan pergerakan sosial-politik di kalangan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Biak. Margaretha Hanita juga menyoroti bagaimana pengaruh cita-cita *Koreri* terhadap dinamika sosial dan politik lokal, serta bagaimana hal ini berinteraksi dengan isu-isu modern seperti globalisasi dan modernisasi.

Penelitian mengenai dinamika konflik di Papua yang dilakukan oleh (Chauvel, 2005) tentang *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. Penelitian ini membahas penguatan nasionalisme Papua dalam beberapa dekade terakhir dan merupakan faktor penting dalam memahami perubahan politik dan budaya di Papua serta hubungan yang terus berkembang antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Studi ini meneliti "silsilah" atau asal-usul nasionalisme Papua, yang telah dibentuk oleh empat faktor utama, yakni; *pertama*, banyak orang Papua memiliki keluhan historis tentang cara tanah air mereka diintegrasikan ke Indonesia, yang mereka anggap terjadi tanpa keinginan mereka dan tanpa partisipasi mereka. *Kedua*, kaum elit Papua merasakan persaingan dengan pejabat Indonesia yang telah mendominasi pemerintahan Papua baik pada masa awal penjajahan Belanda maupun sejak pengambilalihan Indonesia pada tahun 1963. Para peserta Papua dalam persaingan politik dan birokrasi inilah yang juga telah menjadi perumus dan artikulator utama nasionalisme Papua. *Ketiga*, pembangunan ekonomi dan administrasi Papua, bersama dengan rasa perbedaan yang terus berlanjut dari orang Papua dengan orang Indonesia, telah menumbuhkan rasa identitas pan-Papua yang akar populernya jauh lebih luas saat ini daripada saat nasionalisme pertama kali

berkembang di awal tahun 1960-an. *Ke-empat*, transformasi demografi masyarakat Papua, dengan masuknya banyak pemukim Indonesia, telah menimbulkan perasaan yang meluas bahwa orang Papua telah dirampas dan dipinggirkan. Ungkapan yang paling ekstrem, meskipun tidak jarang, dari keyakinan ini adalah pernyataan bahwa orang Papua menghadapi kepunahan di tanah mereka sendiri.

Nasionalisme Papua telah dibentuk oleh reaksi terhadap sejarah dekolonisasi dan integrasi Papua ke Indonesia. Ideologi nasionalis ini mengacu pada bahasa dan prinsip dekolonisasi, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri, untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Akan tetapi, dekolonisasi gagal menghasilkan negara Papua, dan ini telah mendorong dan membentuk perkembangan nasionalisme Papua karena orang Papua tidak suka menjadi "objek" daripada "peserta" dalam perjuangan dekolonisasi. Studi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001, jika diterapkan secara efektif, dapat memberikan kerangka kerja di mana beberapa aspirasi nasionalis Papua berpotensi dapat diakomodasi dalam negara Indonesia. Akan tetapi, pemerintah pusat enggan menerapkan undang-undang tersebut, dan langkah-langkah terkini untuk membagi Papua menjadi beberapa provinsi telah semakin merusak kepercayaan antara warga Papua dan Jakarta. Studi ini diakhiri dengan mengajukan pertanyaan apakah kebijakan pemerintah Indonesia dapat diubah untuk mengakomodasi kepentingan dan nilai-nilai Papua dengan lebih baik, sehingga mendorong warga Papua untuk menerima masa depan politik dalam negara Indonesia.

Richard Chauvel, 2021 dalam penelitian lain tentang dinamika konflik sosial dengan tema *West Papua: Indonesia's last regional conflict* juga membahas tiga komponen utama yang berinteraksi dalam gerakan kemerdekaan Papua: perlawanan bersenjata, perjuangan politik, dan advokasi internasional. Perlawanan bersenjata di Papua secara karakteristik bersifat lokal, sporadis, dan tidak menimbulkan ancaman serius terhadap kekuasaan Indonesia. Namun, respons yang lebih didominasi oleh pendekatan militer terhadap perlawanan bersenjata maupun non-bersenjata ini telah meningkatkan signifikansi kekerasan dalam konflik di Papua melebihi kapasitas dari kelompok-kelompok yang berperang. Keberadaan militer Indonesia yang besar dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan telah menjadi bahan bagi advokasi internasional yang mendukung kemerdekaan.

Di tengah keterbatasan politik yang signifikan, aktivis-aktivis Papua telah menunjukkan kemampuan berkelanjutan untuk menggalang dukungan bagi kemerdekaan, dengan memanfaatkan isu-isu sensitif seperti rasisme, meskipun telah hampir enam dekade

di bawah pemerintahan Indonesia. Artikel ini juga mengkaji kompleksitas dilema yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia: ironisnya, pendekatan militer yang dipilih untuk mempertahankan kontrolnya telah menjadi salah satu faktor yang mendorong semangat kemerdekaan di kalangan Papua. Artikel ini menanyakan, bentuk pemerintahan apa yang mungkin muncul di Indonesia yang demokratis jika sebagian masyarakat Papua tetap menolak pemerintahan Indonesia?

Penelitian terkait dinamika konflik sosial di Papua juga dilakukan oleh (Bertrand, 2014) tentang Otonomi dan Stabilitas: Bahaya Implementasi dan Taktik *'Divide-and-Rule'* di Papua, Indonesia. Penelitian ini menggali ke dalam tantangan-tantangan yang dihadapi selama implementasi kebijakan otonomi dan bagaimana taktik *"divide-and-rule"* atau memecah belah telah diterapkan dalam prosesnya. Kajian ini menyatakan bahwa meskipun pemberian otonomi dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kontrol kepada orang Papua atas sumber daya dan pengelolaan lokal, dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali dibarengi dengan tindakan-tindakan yang justru mengurangi kohesi dan stabilitas sosial. Ini termasuk manipulasi administratif dan politik yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mempertahankan kontrol atas wilayah tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bagaimana praktik *"divide-and-rule"* telah memperburuk konflik internal dan menghambat pembangunan yang inklusif di Papua. Pemecahan wilayah menjadi unit-unit administratif yang lebih kecil, pemerintah pusat berupaya mengurangi kekuatan politik dan kultural masyarakat Papua, sehingga menyulitkan pembentukan entitas politik yang kuat dan unik yang dapat memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan mereka secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun kebijakan otonomi memiliki potensi untuk mendorong pembangunan dan stabilitas di Papua, implementasi yang salah dan penggunaan taktik memecah belah telah menyebabkan lebih banyak perpecahan dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan sensitif terhadap kondisi sosial-politik lokal untuk mencapai tujuan-tujuan otonomi yang sebenarnya. Kajian ini menawarkan rekomendasi bagi pemangku kebijakan untuk mengkaji ulang dan mereformasi praktik-praktik yang telah diterapkan, dengan fokus pada pemberdayaan dan pengakuan yang lebih besar terhadap keunikan dan kebutuhan masyarakat Papua.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ani Widyani Soetjipto & Muhammad Iqbal Yunazwardi, 2021 terkait dengan Nasionalisme Bangsa Papua dalam Bingkai Keindonesiaan. Penelitian tersebut membahas hubungan antara nasionalisme Indonesia

dan identitas nasional Papua. Makalah secara rinci membahas fenomena kekerasan, diskriminasi, dan rasisme yang dihadapi masyarakat Papua sejak bergabungnya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Fokus pembahasan mencakup analisis nasionalisme Papua dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, serta pertanyaan apakah identitas bangsa Papua merupakan bagian dari identitas kebangsaan Indonesia atau justru bagian yang terpisah.

Ringkasan makalah ini membahas hubungan antara nasionalisme Indonesia dan identitas nasional Papua. Makalah menggunakan analisis nasionalisme dari Benedict Anderson untuk menjawab pertanyaan apakah identitas nasional Papua merupakan bagian dari identitas nasional Indonesia atau apakah mereka memiliki nasionalisme yang terpisah. Makalah membahas paradigma nasionalisme tradisional dan modern dalam konteks Indonesia dan Papua. Di satu sisi, nasionalisme Indonesia hadir sebagai hasil kesamaan nasib dan identifikasi kesatuan teritorial, sementara nasionalisme Papua dilihat sebagai bentuk nasionalisme etnis. Persoalan utama dalam adaptasi nation-building yang dilakukan elite Indonesia adalah kegagalan pendekatan tersebut untuk memahami karakteristik keberagaman dalam sebuah komunitas politik. Permasalahan ini menjadi problem negara yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Secara ringkas penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tokoh (Tahun)	Tingkatan (Aras) Kajian	Temuan dan Infikasinya
Ananta, A Utami, D.R.W.W. Handayani, N B (2016)	Penelitian ini menelaah keragaman etnis di Tanah Papua yang mengalami peningkatan signifikan dalam hal migrasi dan pertumbuhan gerakan-gerakan etno-sentris.	Tanah Papua secara etnis sangat heterogen, namun tidak mengalami polarisasi yang tajam. Papua Barat dikenal lebih heterogen dibandingkan dengan Papua yang cenderung lebih polarisasi. Akan tetapi, kondisi ini tidak secara signifikan mempengaruhi potensi terjadinya konflik etnis. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya antisipasi konflik etnis dalam setiap penyusunan program yang melibatkan migrasi atau inisiatif untuk mendorong migrasi ke Tanah Papua. Sejak proses desentralisasi yang dimulai pada tahun 1999 di Indonesia, pemerintah telah berhasil mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun, hal ini juga telah mendorong peningkatan kebijakan yang berorientasi pada pemerintahan kabupaten, yang

Tokoh (Tahun)	Tingkatan (Aras) Kajian	Temuan dan Infikasinya
		berdampak pada peningkatan kesadaran identitas etnis dan pengaruhnya terhadap hubungan antara keragaman etnis dengan pembangunan di wilayah tersebut.
Bernada Meteray (2021)	Nasionalisme ganda, dalam konteks ini, merujuk pada fenomena di mana orang Papua merasakan keberpihakan atau loyalitas kepada dua entitas nasional yang berbeda: nasionalisme Indonesia dan identitas etnis Papua.	Nasionalisme ganda di Papua bukan hanya hasil dari ketidakpuasan politik, tetapi juga erat kaitannya dengan sejarah, budaya, dan konteks sosio-ekonomi yang unik di wilayah tersebut.
Avelinus Lefaan (2021)	Penelitian ini membahas peran politik identitas dalam dinamika politik Papua, Indonesia. Tulisan ini menyoroti tarik-menarik yang terus terjadi antara identitas "Papua Pegunungan" dan "Papua Pesisir", dan bagaimana hal ini menjadi faktor penting dalam pemilihan umum di Papua.	Pemahaman tentang etnisitas di Papua masih bersifat esensialistik, berdasarkan karakteristik biologis yang permanen, daripada pandangan yang lebih konstruktivis yang melihat etnisitas sebagai konstruksi sosial-budaya yang cair. Perspektif esensialis ini telah dieksploitasi oleh elit politik untuk mendapatkan dukungan massa.
Margaretha Hanita (2019)	Cita-cita Koreri: Gerakan Politik Orang Papua" memberikan ulasan mendalam tentang gerakan politik yang dilakukan oleh masyarakat Papua dalam mencapai kemerdekaan dan keadilan sosial.	Koreri sendiri merupakan istilah dari kepercayaan lokal yang mengandung harapan akan datangnya era kedamaian dan kemakmuran secara tiba-tiba dan adil untuk semua. Melalui kajian historis dan politis, penelitian ini menyajikan analisis tentang bagaimana aspirasi Koreri telah mempengaruhi dinamika politik di Papua serta perjuangan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dan penindasan.
Richard Chavuel (2005)	Studi ini meneliti "silsilah" atau asal-usul nasionalisme Papua	Nasionalisme Papua telah dibentuk oleh reaksi terhadap sejarah dekolonisasi dan integrasi Papua ke Indonesia. Ideologi nasionalis ini mengacu pada bahasa dan prinsip dekolonisasi, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri, untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Akan tetapi, dekolonisasi gagal menghasilkan negara Papua, dan ini telah mendorong dan membentuk perkembangan nasionalisme Papua karena orang Papua tidak suka menjadi

Tokoh (Tahun)	Tingkatan (Aras) Kajian	Temuan dan Infikasinya
		"objek" daripada "peserta" dalam perjuangan dekolonisasi. Studi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001, jika diterapkan secara efektif, dapat memberikan kerangka kerja di mana beberapa aspirasi nasionalis Papua berpotensi dapat diakomodasi dalam negara Indonesia. Akan tetapi, pemerintah pusat enggan menerapkan undang-undang tersebut, dan langkah-langkah terkini untuk membagi Papua menjadi beberapa provinsi telah semakin merusak kepercayaan antara warga Papua dan Jakarta.
Richard Chavuel (2021)	Penelitian ini membahas tentang konflik di Papua Barat, yang merupakan konflik regional terakhir di Indonesia.	Hasil penelitian ini menggambarkan sejarah, kondisi saat ini, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Pembahasan tersebut juga melibatkan analisis tentang dinamika lokal dan internasional yang mempengaruhi konflik di Papua Barat.
Bertrand, Jacques (2014)	Makalah penelitian ini membahas penerapan dan dampak otonomi dalam mengelola konflik nasionalis subnegara, dengan fokus khusus pada situasi di Papua, Indonesia.	Otonomi dipandang sebagai instrumen kelembagaan untuk mengelola konflik nasionalis subnegara, dan keberhasilan penerapannya sangat penting dalam menentukan dampaknya terhadap konflik. Sementara negara pusat mungkin memandang tidak adanya kekerasan dan stabilitas sebagai ukuran keberhasilan, kelompok yang dirugikan mungkin memandang keberhasilan sebagai perolehan kekuatan dan sumber daya baru.
Ani Widyani Soetjipto dan Muhammad Iqbal Yunazwardi (2021)	Penelitian ini ditujukan pada fenomena kekerasan, diskriminasi dan rasisme yang dihadapi oleh masyarakat Papua sejak integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia. Diskusi tersebut berpusat pada analisis terhadap nasionalisme Papua dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, serta	Nasionalisme Indonesia hadir sebagai hasil kesamaan nasib dan identifikasi kesatuan teritorial, sementara nasionalisme Papua dilihat sebagai bentuk nasionalisme etnis. Persoalan utama dalam adaptasi nation-building yang dilakukan elite Indonesia adalah kegagalan pendekatan tersebut untuk memahami karakteristik keberagaman dalam sebuah komunitas politik.

Tokoh (Tahun)	Tingkatan (Aras) Kajian	Temuan dan Infikasinya
	mengeksplorasi pertanyaan apakah identitas bangsa Papua merupakan bagian integral dari identitas kebangsaan Indonesia atau merupakan entitas yang terpisah.	Permasalahan ini menjadi problem negara yang tidak pernah berhenti sampai hari ini.

Tabel 1. 1. Matrix Studi-Studi Konflik Etnis di Papua

Berdasarkan temuan dari studi-studi sebelumnya yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa beberapa peneliti telah mengkaji terkait konflik etnis di Papua. Fokus kajian dan temuan penelitian-penelitian terdahulu tersebut menggambarkan karakteristik utama dari fenomena konflik sosial di Papua yang dipengaruhi oleh interaksi antara aspirasi lokal yang dimaknai dalam konteks kebebasan, identitas etnis dan nasionalisme Indonesia. Berpijak dari temuan-temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mencoba membuat suatu rumusan sebagai novelti adalah bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum secara spesifik menjelaskan dinamika konflik sosial yang terjadi sebagai akibat dari adanya persepsi etnisitas yang terbentuk dari makna kebebasan yang dimaknai sebagai kepercayaan.

G. KERANGKA KONSEP

Alur pikir dalam penelitian ini adalah untuk memahami persepsi etnisitas pada masyarakat Papua yang membentuk perspektif mereka terhadap dinamika konflik sosial di Tanah Papua. Faktor mendasar dari dinamika konflik yang terjadi dimulai dari suatu kepercayaan yang telah ada dan dipegang oleh masyarakat Papua jauh sebelum kedatangan bangsa lain di wilayah mereka. Masyarakat Papua percaya pada mitos tentang suatu masa kebebasan dimana mereka tidak lagi hidup didalam dunia yang penuh dengan berbagai persoalan. Mereka meyakini bahwa untuk mencapai masa kebebasan tersebut, akan datang seorang laki-laki yang akan menunjukkan jalan ke tempat dimana masa kebebasan tersebut akan terjadi. Jenis kepercayaan inilah oleh (Amaral, 2023) menyebutnya sebagai *millenial messianic* karena bertema asimetris dengan kolonialisme.

Makna dari kepercayaan ini selanjutnya membentuk persepsi etnisitas pada masyarakat Papua yang dipengaruhi oleh empat faktor yaitu identifikasi sosial, aspek budaya, aspek sejarah dan penguatan identitas etnis Papua. Empat faktor pembentukan etnisitas pada masyarakat Papua masing-masing menampilkan aspek tersendiri yang menggambarkan pemaknaan dari kepercayaan yang mereka anut. Pembentukan persepsi

etnisitas pada masyarakat Papua berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya terjadi pada dua masa yang berbeda yaitu pada masa penjajahan kolonial Belanda dan pada masa setelah integrasi Papua ke Indonesia. Persepsi etnisitas pada masyarakat Papua adalah pemaknaan dari identitas etnis mereka yang didasarkan pada aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat Papua.

Persepsi etnisitas pada masyarakat Papua selanjutnya membentuk perspektif masyarakat Papua terhadap identitas etnisnya sendiri dan membedakan identitas etnisnya dengan kehadiran etnis lain di wilayahnya. Walaupun di Papua sendiri terdapat banyak suku dengan beragam bahasa, namun perspektif masyarakat Papua terhadap identitas etnisnya tetap melekat berdasarkan ciri khasnya secara fenotipe (rambut keriting dan kulit hitam). Perspektif masyarakat Papua yang terbentuk membentuk perasaan *otherness*. Perasaan *otherness* terjadi melalui identitas kolektif yang dibangun dan bertindak sebagai cermin untuk melihat dan untuk mengenali diri sendiri dan membedakannya dirinya dengan orang lain (Fernández & González-Monfort, 2020). Perspektif masyarakat Papua terhadap identitas etnisnya mulai mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan pengaruh dari dua entitas utama: kolonial Belanda selama era penjajahan dan pemerintah Indonesia selama era Orde Baru serta masa reformasi yang diikuti oleh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Pada masa kolonial, Belanda menerapkan sistem pemerintahannya dengan menetapkan batasan-batasan terhadap ruang gerak masyarakat dalam menjalankan ritual-ritual kepercayaannya sehingga menyebabkan terjadi gerakan-gerakan perlawanan religius. Selama masa kolonial, Pemerintah Belanda enggan menyerahkan Papua kepada Indonesia dan mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari Indonesia, meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Belanda dengan rencanya ingin menjadikan Papua sebagai bagian dari wilayah kolonisasinya berupaya untuk mempersiapkan semua upaya untuk menjadikan Papua sebagai negara merdeka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Belanda pada waktu adalah dengan membangun isu politik identitas. Politik identitas yang dibangun oleh Belanda itu didasarkan pada ciri khas rasial berdasarkan fenotipe (kulit hitam dan rambut keriting) yang dibuat oleh Dumont d'Urville pada tahun 1832 yaitu Melanesia, Polinesia dan Mikronesia (Clark, 2003). Tujuan Belanda menerapkan politik identitas adalah semata-mata untuk memisahkan Papua dari Indonesia.

Proses integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1962 hingga pelaksanaan PEPERA pada tahun 1969 merupakan peristiwa penting yang berperan dalam memperkuat identitas etnis di kalangan masyarakat Papua. Ketidakpuasan masyarakat

Papua terhadap hasil jejak pendapat yang dilaksanakan mendorong mereka untuk memulai serangkaian protes dan membentuk gerakan sosial yang menuntut agar Papua tidak diintegrasikan ke dalam Indonesia. Pada titik ini, perspektif masyarakat Papua terhadap identitas etnis mereka sebagai bangsa yang distingtif semakin menguat.

Selama era pasca PEPERA hingga masa rezim Orde Baru, muncul perasaan curiga yang konstan. Masyarakat Papua mencurigai etnis non-Papua sebagai kelompok yang datang untuk mengambil sumber daya alam yang berada di atas tanah adat mereka. Selain itu, stigma separatis yang diterapkan oleh institusi negara kepada penduduk Papua telah lebih lanjut menguatkan solidaritas di antara mereka serta memperkuat identitas etnis mereka. Berbagai insiden pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyat Papua juga berkontribusi pada peningkatan solidaritas dan penguatan identitas etnis di kalangan masyarakat Papua.

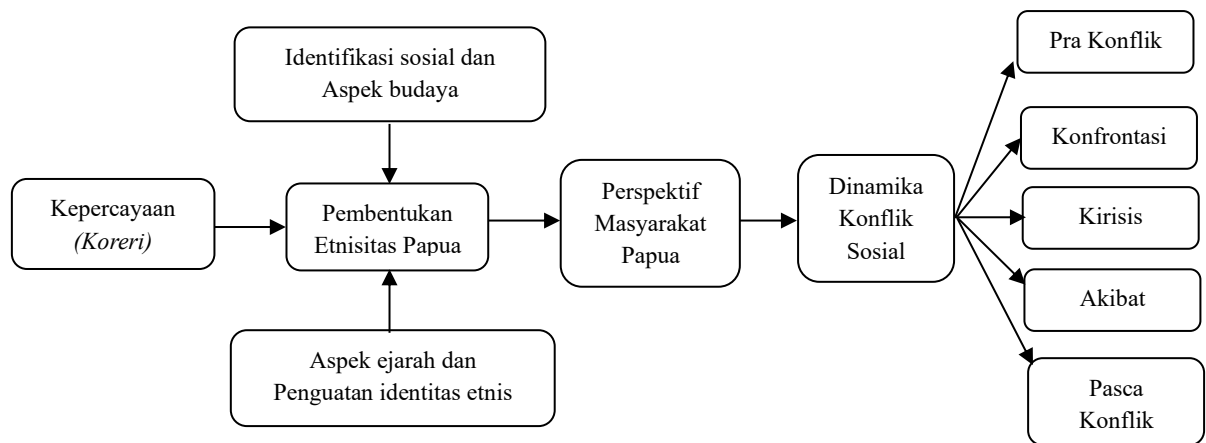
Otonomi khusus di Papua adalah fenomena baru yang memberikan nuansa unik dalam perspektif masyarakat Papua. Era otonomi khusus ini tidak hanya melibatkan pemahaman mengenai kebebasan, tetapi juga membentuk persepsi baru mengenai etnisitas di antara masyarakat Papua. Fenomena ini telah berkontribusi pada pembentukan perspektif etnisitas yang lebih spesifik dan terbatas pada lokasi etnis tertentu. Berbeda dengan masa kolonial dan era Orde Baru, masyarakat Papua dalam era otonomi khusus ini melihat identitas etnis tidak lagi secara umum, tetapi berdasarkan suku-suku yang mendiami wilayah tertentu yang dibagi berdasarkan pengelolaan administratif negara. Perspektif yang berkembang di kalangan masyarakat Papua adalah interpretasi kebebasan sebagai terminologi “menjadi tuan di negeri sendiri”. Terminologi menjadi tuan di negeri sendiri telah mengubah perspektif masyarakat Papua terhadap identitas etnisnya menjadi lebih sempit. Perspektif masyarakat terkait dengan identitas etnisnya berdasarkan pada suku-suku asli yang mendiami wilayah kabupaten-kabupaten tertentu, telah berubah dari pandangan umum sebelumnya di mana masyarakat diidentifikasi secara luas sebagai orang Papua dengan ciri fenotipik yang serupa.

Perspektif etnisitas dalam masyarakat Papua, yang diwarnai oleh persepsi etnisitas dan interpretasi kebebasan, menjadi faktor utama penyebab konflik sosial di wilayah tersebut. Fenomena dinamika konflik di Papua telah terjadi sejak lama, jauh sebelum Papua menjadi bagian integral dari Indonesia. Konflik di Papua berawal pada era penyebaran agama Kristen oleh para misionaris Eropa. Selama periode tersebut, masyarakat Papua merasa bahwa doktrin-doktrin Kristen yang disebarkan oleh para misionaris tersebut berpotensi mengancam ritual-ritual dan upacara adat mereka, sehingga memicu terjadinya gerakan-gerakan perlawanan. (Strelan & Godschalk, 1989) menjuluki

gerakan-gerakan ini sebagai "gerakan mesianik." Di era kolonial Belanda, gerakan perlawanan ini terus berlangsung dan mengalami pergeseran dari gerakan berbasis religius menjadi gerakan yang dipicu oleh regulasi-regulasi kolonial yang membatasi kebebasan masyarakat. Ketidakpuasan tersebut telah memicu eskalasi perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda.

Pada tahun 1969, Papua secara resmi diintegrasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat. Meskipun proses ini telah mendapatkan pengakuan resmi, konflik masih terus berkecamuk di wilayah tersebut. Masyarakat Papua, pada waktu itu, menyatakan protesnya dengan menentang hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat tersebut. Sebagai ekspresi dari gerakan perlawanan, masyarakat membentuk sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerakan ini berlangsung terus menerus dari tahun 1969 hingga tahun 2001, di mana pemberian status otonomi khusus kepada Papua diadopsi sebagai resolusi dalam menyelesaikan konflik yang ada. Faktor utama yang menjadi dasar konflik antara pemerintah dan masyarakat Papua adalah aspirasi sebagian masyarakat untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspirasi ini, yang berulang kali muncul, didasarkan pada pandangan bahwa terdapat perbedaan identitas etnis yang signifikan antara masyarakat Papua dan etnis-etnis lain yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2001, implementasi otonomi khusus di Papua menginduksi perubahan signifikan terhadap dinamika dan objek konflik di wilayah tersebut. Perubahan ini menggambarkan pergeseran dalam pola interaksi konflik, yang tidak hanya melibatkan interaksi antara masyarakat Papua dengan pendatang, tetapi juga antara masyarakat Papua dengan pemerintah. Konflik internal antara sesama orang Papua juga mengemuka sebagai aspek penting dalam dinamika tersebut. Aspek utama yang menjadi pusat penyebab konflik pada era otonomi khusus di Papua adalah persepsi terhadap etnisitas. Identifikasi etnis telah dikonstruksi secara spesifik berdasarkan skala suku yang mendiami kabupaten-kabupaten tertentu di wilayah tersebut. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, kerangka konsep dari penelitian ini dapat disederhanakan dan diilustrasikan pada skema kerangka konsep di bawah ini.



Gambar 1. 1. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep yang telah diuraikan di atas, terdapat kebutuhan akan penjelasan yang bersifat teoritis, yang dapat digunakan sebagai dasar teoritis dalam mengkaji fenomena yang menjadi fokus dari penelitian ini. Secara teoritis, pemahaman mengenai persepsi etnisitas serta makna kebebasan—yang berpengaruh terhadap dinamika konflik—dapat dielaborasi dengan memanfaatkan teori konflik yang telah dikembangkan oleh sosiolog Ralf Dahrendorf. Dahrendorf mengemukakan pandangannya bahwa keberadaan dan konflik kepentingan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal. Berbeda dengan teori fungsionalisme struktural yang menggambarkan masyarakat sebagai sistem yang stabil dan terintegrasi, Dahrendorf memfokuskan pada karakteristik dinamis dan berubahnya masyarakat yang dipicu oleh adanya konflik. Menurutnya, konflik muncul karena adanya divergensi kepentingan antar kelompok yang berlawanan, yang mana hal ini menjadi motor penggerak perubahan sosial. Dahrendorf berargumen bahwa konflik adalah elemen normal dalam struktur masyarakat dan bahkan dapat berfungsi sebagai alat utama dalam memacu inovasi serta perubahan sosial (Dahrendorf, 2017).

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf merupakan teori pokok yang mampu memunculkan berbagai teori turunan untuk menjelaskan fenomena sosial sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Teori turunan tersebut meliputi teori-teori yang secara sosiologis mendiskusikan hubungan antara persepsi etnisitas dan makna kebebasan yang berbasis pada keyakinan. Selain itu, ada pula teori sosiologis yang menjelaskan tentang bagaimana perspektif masyarakat terbentuk dari persepsi etnisitas dan kebebasan yang mempengaruhi dinamika konflik sosial dalam masyarakat plural.

BAB. II

PERSEPSI ETNISITAS DAN MAKNA KEBEBASAN MASYARAKAT PAPUA

A. ABSTRAK

Kebutuhan akan kebebasan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Papua. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis makna kebebasan bagi masyarakat Papua dengan mendalami perspektif dan pengalaman mereka terkait dengan isu-isu kebebasan yang dihadapi. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis persepsi etnisitas yang dibentuk berdasarkan makna kebebasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi fenomenologi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dan Jayawijaya Provinsi Papua. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang melibatkan elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda dan Perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat Papua sesungguhnya bukan berdasarkan aspek politik akan tetapi kebebasan sosial budaya. Kebutuhan akan pengakuan identitas budaya dan pengelolaan sumber daya alam secara adil menjadi nilai utama dari makna kebebasan yang diharapkan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Kebebasan Masyarakat Papua, Persepsi Etnisitas, Identitas Sosial Budaya, Kepercayaan Tradisional.

B. PENDAHULUAN

Persepsi etnisitas dalam pengertiannya mengacu pada cara pandang dan pemahaman individu mengenai kepribadian, karakteristik, maupun ciri-ciri khas yang dimiliki oleh suatu kelompok etnis. Persepsi tentang etnisitas sendiri, menurut (Quinlan, 2024), mencerminkan pandangan terhadap nilai-nilai yang dirasakan dari representasi etnis tertentu sebagai metode untuk memahami identitas, budaya, dan struktur sosial. Persepsi etnisitas dalam konteks yang lebih luas menurut (Atkinson, 2024), bahwa persepsi etnisitas menekankan pada pengakuan atas perbedaan budaya, tradisi, bahasa, dan berbagai aspek lain yang membedakan satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya. Persepsi ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dari perspektif internal, persepsi etnisitas bisa berasal dari identitas diri

yang kuat terkait dengan kelompok etnis tertentu. Menurut (V. J. Taylor et al., 2023), individu yang merasa terikat kuat dengan kelompoknya akan cenderung memiliki persepsi yang positif dan bangga terhadap etnisitasnya sendiri. Persepsi ini juga bisa dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau interaksi sosial yang memperkuat pemahaman tentang nilai dan norma yang dianut oleh kelompok etnisnya. Sementara itu, faktor eksternal seperti media, pendidikan, kebijakan pemerintah, dan interaksi antar kelompok bisa berperan dalam membentuk atau mengubah persepsi etnisitas (Quinlan, 2024). Media misalnya, bisa menampilkan representasi kelompok etnis tertentu yang bisa mempengaruhi pandangan masyarakat umum (Gorshenina, 2022). Kebijakan pemerintah terkait dengan keragaman etnis dan integrasi sosial juga dapat mempengaruhi cara pandang individu atau masyarakat terhadap kelompok etnis lain (Kamau, 2023).

Konsep kebebasan adalah salah satu yang paling mendasar dan universal, tetapi juga salah satu yang paling kompleks dan sulit untuk didefinisikan. Kebebasan mencakup hak individu untuk melakukan tindakan serta membuat keputusan tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain. Prinsip ini juga mencakup kemampuan individu untuk mengekspresikan pendapat dan ide-ide mereka secara bebas (Bychawska-Siniarska, 2017). Kebebasan merupakan suatu "pilihan" yang harus dikomunikasikan dan dibangun diantara setiap individu dan masyarakat (Tsuchimoto & Koyama, 2024). Kebebasan sebagai suatu pilihan oleh (Ejike, 2024) menganggapnya sebagai kebebasan otentik. Artinya bahwa tindakan pilihan bebas adalah merupakan komitmen yang dibuat oleh individu atau kelompok sebagai cara hidup yang dipilih dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan otentik sesungguhnya merupakan implementasi dari konsep kebebasan yang tulus atau kebebasan yang sesuai pada makna aslinya (Valdez, 2016). Menurut (Preston, 1983) otentikasi makna kebebasan yang sesungguhnya, terlepas dari pendukung liberal maupun non-liberal yang harus menjamim kebebasan kepada individu terkait hak hidupnya secara bebas.

Meskipun demikian, konsep kebebasan tidak hanya terbatas pada hak individu, tetapi juga melibatkan kewajiban dan tanggung jawab sosial. Definisi kebebasan dapat menjadi sangat kompleks dan sulit untuk didefinisikan secara pasti karena variasi interpretasi yang luas dan beragam. Kebebasan dapat berarti sesuatu yang berbeda bagi setiap individu, tergantung pada latar belakang budaya, sosial, politik, dan pribadi mereka (Yana & Grothe, 2024). Misalnya, seorang individu mungkin menganggap dirinya bebas jika dia dapat melakukan apa yang dia inginkan tanpa adanya batasan, sementara orang lain mungkin merasa bebas ketika mereka memiliki keamanan finansial atau ketika mereka

dapat hidup tanpa rasa takut. Jaminan hak hidup bebas dari intimidasi dan sebagai segala bentuk penyiksaan, adalah merupakan jaminan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam deklarasi HAM PBB (Sabela & Pritaningtias, 2017).

Aspek hak asasi manusia yang fundamental dan harus dijamin oleh negara adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini mencakup berbagai aspek termasuk tempat ibadah, pelaksanaan fungsi keagamaan secara bebas, serta penghindaran dari diskriminasi terhadap agama tertentu. (Rezmer, 2024) menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah kategori inklusif yang meliputi berbagai dimensi tersebut. Kebebasan beragama juga diakui sebagai hak dasar setiap individu yang melekat dan tidak dapat diganggu gugat, seperti yang ditegaskan oleh (Alicino, 2024). Nilai yang diyakini dalam kebebasan beragama memerlukan adanya toleransi yang menjadi kunci untuk hidup berdampingan secara damai (del Ángel Iglesias Vázquez & Paladini, 2023). Konstitusi menjamin negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi yang dapat mengganggu kebebasan beragama.

Agama sebagai wujud dari kepercayaan adalah unsur kebudayaan yang esensial dan memainkan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya, keyakinan tentang adanya Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Keyakinan ini biasanya mempengaruhi nilai-nilai etika dan moral yang dipegang oleh manusia (Rector & Polivka, 2013). Selain itu, kepercayaan juga dapat mencakup sistem ritual dan upacara yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu (Arsenault & Zawadzka, 2014). Ritual dan upacara ini sering kali dilakukan untuk menghormati atau berkomunikasi dengan entitas spiritual, menghormati nenek moyang, atau merayakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat (Jakubowski, 2024). Ritual dan upacara tersebut merupakan tindakan pilihan secara bebas yang dilakukan oleh individu didalam kelompoknya masing-masing secara bertanggungjawab.

Kebebasan sebagai keyakinan merupakan pilihan fundamental yang inheren dan merupakan hak dasar setiap individu, terkait erat dengan nilai-nilai spiritual yang berpengaruh terhadap etika dan moral manusia. Penelitian yang dilakukan oleh (Jafari et al., 2023) telah menunjukkan bahwa karakteristik yang membedakan manusia dari makhluk lain adalah kekuatan untuk memilih secara bebas, yang membedakan perilaku manusia yang tidak hanya didorong oleh naluri atau kebutuhan saja. Akibatnya, kebebasan memilih ini menciptakan dasar bagi martabat manusia, memberikan nilai pada individu berdasarkan pilihan yang mereka buat. Kepercayaan sebagai objek yang dihargai dihargai karena didalamnya terdapat pengalaman, kenangan, orang, tempat, atau nilai-nilai yang

penting yang dapat menunjukkan nilai emosional dengan mewujudkan aspek penting dari identitas diri seseorang (Orth et al., 2018). Kepercayaan sebagai identitas ini merupakan gambaran mengenai identitas seseorang terkait dengan keyakinan tradisi dari kepercayaan yang dianutnya. Kebebasan sebagai kepercayaan merupakan representasi dari identitas seseorang, yang terkait erat dengan tradisi dan keyakinan yang dianutnya, seperti misalnya yang terjadi pada siswa muslim di Amerika yang. Para pemimpin sekolah memfasilitasi dan memberikan setiap kebebasan dan pengaruhnya terhadap pengembangan identitas siswa Muslim Amerika (Brooks & Ezzani, 2024).

Berdasarkan tinjauan literatur mengenai konsep etnisitas, kebebasan, dan kepercayaan, diketahui bahwa kepercayaan berperan sebagai salah satu fondasi penting dalam membentuk persepsi terhadap etnisitas beserta interpretasinya dalam kaitannya yang saling tergantung dengan kebebasan. Penjelasan ilmiah atas hubungan ini dapat ditelusuri melalui beberapa teori utama yang berbeda namun menunjukkan hubungan diantara ketiga aspek tersebut. Memaknai persepsi etnisitas dapat dijelaskan menurut teori identitas yang memberikan pandangan tentang bagaimana etnisitas dipandang dan dibentuk persepsinya. Menurut (Tajfel & Turner, 2004) teori identitas sosial merujuk pada identitas individu bukan hanya hasil dari atribut personal, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok sosial yang menjadi bagian dari individu tersebut. Tajfel & Turner berpendapat bahwa *"Ethnicity, as one of the foundations of social categories, influences the way individuals perceive themselves and others, which can affect social interaction and the perception of individual freedom of behavior and thought."* Sedangkan hubungan antara etnisitas dan kebebasan dalam teori kebebasan menurut (Eriksen, 1993) bahwa etnisitas tidak hanya sebagai identitas yang diberikan tapi juga sebagai proses konstruksi sosial yang terus-menerus. Etnisitas dapat mempengaruhi persepsi kebebasan karena memberikan lensa melalui mana individu menilai apa yang bisa atau tidak bisa mereka lakukan dalam konteks sosial tertentu. Hal ini termasuk nilai dan keyakinannya sebagai faktor utama dalam mempengaruhi pemahaman mereka tentang kebebasan.

Sementara itu persepsi etnisitas dan kebebasan yang lahir dari kepercayaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini terutama yang terjadi di Papua, merupakan konsep yang pada hakikatnya berasal dari kepercayaan yang telah ada dan berkembang secara turun-temurun. Kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Papua berisi serangkaian nilai dan norma sosial yang mengarahkan dan mengatur pola hidup serta interaksi mereka dengan lingkungan alam sekitar. Norma-norma ini berperan penting dalam membentuk identitas sosial dan menjaga keharmonisan dalam keberlangsungan hidup mereka yang

berdampingan dengan alam. Penjelasan teori yang melingkupi persepsi etnisitas dalam teori identitas sosial dan konsepsi kebebasan dalam teori konstruksi sosial dalam kaitannya dengan kepercayaan, dapat ditelaah apabila dianalisis melalui teori keagenan. Menurut (Carlston et al., 2024) keagenan personal adalah kemampuan individu untuk melakukan tindakan atas dasar keinginannya sendiri, yang merupakan dasar dari kebebasan. Makna kebebasan ini bisa dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut oleh seseorang, yang seringkali diwarnai oleh nilai dan norma yang ada dalam etnisitasnya.

Penjelasan teoretis ini tentunya menjadi dasar dari dua permasalahan utama dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana persepsi etnisitas pada masyarakat Papua? Kedua, bagaimana makna kebebasan pada masyarakat Papua? Kedua pertanyaan tersebut diajukan untuk menjawab bagaimana pandangan masyarakat Papua dalam memaknai etnisitasnya dalam negara Indonesia. Pertanyaan lain yang diajukan juga bertujuan untuk menjawab terkait bagaimana pemaknaan terhadap makna kebebasan dalam kepercayaan pada masyarakat Papua serta bagaimana makna kebebasan tersebut berubah menjadi makna lain. Manfaat penting dari penelitian ini adalah terutama dalam menemukan konsep pembentukan identitas etnis dan pemaknaan makna kebebasan dalam manajemen konflik.

C. METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode fenomenologi untuk menganalisis fenomena dan gambaran terkait makna persepsi etnisitas masyarakat Papua dalam konteks kepercayaan tradisionalnya. Selain itu, penerapan metode penelitian fenomenologi juga menjadi tepat dalam menganalisis pembentukan persepsi etnisitas yang berakar pada kebudayaan masyarakat Papua. Alasan penggunaan metode penelitian fenomenologi dalam studi ini dikarenakan, selain data primer berupa informasi hasil observasi dan wawancara, tetapi juga dibutuhkan data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur valid sebagai informasi tambahan yang mendukung.

2. Lokasi Penelitian

a. Kabupaten Manokwari

Alasan dipilihnya Kabupaten Manokwari sebagai Lokasi penelitian adalah karena Manokwari merupakan tempat dimana Injil pertama kali hadir di Tanah Papua pada 05 Februari 1855, oleh sebab itu tanggal 05 Februari setiap tahunnya diperingati oleh seluruh Masyarakat Papua sebagai momend

dimulainya peradaban baru di Tanah Papua. Pengumpulan data yang dilakukan di kota Manokwari oleh peneliti tidak mengalami kendala karena peneliti berdomisi di Kota Manokwari. Kendala transportasi yang menjadi tantangan medan di Papua dan jarak tempuh untuk mencapai tempat tinggal informan tidak menjadi masalah dalam hal ini. Ketersediaan waktu yang untuk bertemu dengan informan juga bukan merupakan kendala yang dihadapi oleh peneliti.

Secara geografis Kabupaten Manokwari berada pada $0^{\circ}15' - 3^{\circ}25'$ Lintang Selatan dan $132^{\circ}35' - 134^{\circ}45'$ Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Manokwari memiliki Batasan geografis sebagai berikut: disebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, disebelah timur dengan Teluk Cenderawasih, disebelah selatan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan, serta di sebelah barat dengan Kabupaten Sorong. Luas wilayah Kabupaten Manokwari adalah $3.168,28 \text{ km}^2$ dengan ketinggian 25-meter dari permukaan laut. Lokasi ini memposisikan Kabupaten Manokwari sebagai wilayah yang strategis dari sisi akses ke berbagai wilayah laut serta interaksi antar kabupaten di Papua Barat.

b. Kabupaten Jayawijaya

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Jayawijaya adalah karena wilayah tersebut merupakan tempat dimana intensitas konflik cukup tinggi. Selain itu beberapa aktifitas organisasi sayap pergerakan OPM seperti KNPB berasal dari beberapa kabupaten di wilayah pegunungan Tengah Papua. Tempat domisili peneliti adalah di Kota Manowari sedangkan lokasi penelitian berada di Kabupaten Jayawijaya sehingga untuk mencapai lokasi penelitian ditempuh dengan pesawat udara selama kurang lebih 3 jam. Kendala yang dihadapi terutama adalah biaya tiket dari Manokwari ke Wamena dan juga tingginya biaya transportasi lokal dilapangan. Kesulitan lain yang dihadapi saat dilapangan untuk melakukan wawancara adalah kendala dalam bertemu dan melakukan wawancara dengan informan.

Kabupaten Jayawijaya merupakan lembah di dataran tinggi Papua dengan ketinggian rata-rata + 1.855-meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi $3.45' - 4.2'$ Lintang Selatan, serta $138.3' - 139.4'$ bujur Timur. Luas wilayah Jayawijaya, adalah berupa daratan seluas $13.925,31 \text{ km}^2$. Lembah Baliem dikelilingi oleh Pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena puncak-puncak salju abadinya, antara lain: Puncak Trikora (4.750 m), Puncak Mandala (4.700 m) dan Puncak Yamin (4.595 m). Suhu udara bervariasi antara 12°C sampai dengan

30 0C dengan rata- rata tiap bulan mencapai 19 0C. Secara geografisnya Kabupaten Jayawijaya memiliki batas-batas: Utara –Kabupaten Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Tolikara; Selatan – Kabupaten Nduga dan Yahukimo; Barat – Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya; Timur – Kabupaten Yahukimo dan Yalimo. Kabupaten Jayawijaya berada di rangkaian pegunungan tengah Papua bersama Kabupaten Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Yalimo, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo.

3. Alokasi Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Oktober 2022 sampai dengan November 2024, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan Oktober 2022 (Minggu)				Ket
		I	II	III	IV	
1	Penyusunan pertanyaan penelitian sebagai pedoman wawancara					
2	Distribusi surat ijin penelitian					
		Bulan November 2022 (Minggu)				
3	Observasi untuk penentuan informan penelitian Kabupaten Manokwari					
4	Melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan					
		Bulan Desember 2022 (Minggu)				
5	Observasi untuk penentuan informan penelitian Kabupaten Jayawijaya					
4	Melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan					
		Bulan Januari 2023 – November 2024 (Minggu)				
5	Penulisan laporan					

Tabel 2. 1. Alokasi Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama periode waktu yang relatif panjang, yang dipengaruhi oleh penggunaan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini secara

inheren tidak dibatasi oleh fenomena yang terjadi pada waktu tertentu saja. Selain itu, durasi penelitian yang panjang juga diperlukan dalam konteks penulisan laporan, khususnya dalam proses analisis dan interpretasi, serta penyajian data. Penyebab lain dari perlunya waktu yang lama adalah karena dalam penulisan laporan, jika masih terdapat kebutuhan akan informasi tambahan, peneliti dapat melakukan konfirmasi ke informan untuk memperoleh data tambahan tersebut. Proses pencarian data ini berlangsung hingga konsultasi penulisan laporan selesai, seminar hasil penelitian dilaksanakan, dan perbaikan-perbaikan dilakukan berdasarkan masukan yang diberikan oleh penilai serta tim promotor.

4. Pengelolaan Peran sebagai Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai instrumen penelitian utama dalam penggalian data. Sebagai instrumen penelitian, peneliti berperan mengamati, mendengar, dan menginterpretasi perilaku dan ungkapan yang ditemui selama penelitian dengan objektif, tetapi juga sensitif terhadap konteks sosial dan budaya yang ada. Peneliti juga berperan menjaga keseimbangan antara keterlibatan emosional dan jarak objektif untuk menghindari bias dalam merekam dan menganalisis data. Selain itu peneliti juga merefleksikan pengalaman pribadi dan bagaimana pengalaman tersebut mungkin mempengaruhi penelitian ini.

5. Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana informan dipilih secara sengaja berdasarkan tujuan yang jelas. Kriteria pemilihan informan melibatkan individu yang dianggap memiliki pengetahuan serta pengalaman relevan yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan penelitian. Informan terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh agama dan birokrat, yang semuanya diidentifikasi dari sampel target. Pemilihan ini didasarkan pada kemampuan mereka untuk menyediakan data yang valid dan dapat diandalkan, yang akan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan informasi yang diperlukan peneliti perlu untuk menetapkan kriteria informan sebagai berikut :

- a. Informan harus berasal dari etnis yang ada di Papua.

- b. Usia minimal 20. Alasan dibatasi usia minimal 20 tahun adalah untuk memahami pandangan yang mungkin berbeda berdasarkan pengalaman hidup dalam konteks sosial dan historis yang beragam.
- c. Informan berasal dari etnis Papua dari berbagai strata sosial dan ekonomi.
- d. Informan adalah etnis Papua yang secara langsung terlibat dalam konflik sosial atau yang memiliki pengalaman langsung dengan konflik sosial di Papua, serta mereka yang tidak terlibat langsung untuk memperoleh perspektif komparatif.
- e. Berasal dari organisasi masyarakat, pemerintahan atau organisasi masyarakat yang memiliki perspektif berbeda dengan ideologi Indonesia.

No	Nama/Inisial	Umur	Posisi
1	KM (R1)	77 tahun	Dewan adat Wilayah III Domberay
2	DFW (R2)	51 tahun	Intelektual dan Tokoh Pemuda
3	Pdt. NM (R3)	62 tahun	Tokoh Agama
4	JK (R4)	53 tahun	Kesbangpol Manokwari
5	ET (R5)	48 tahun	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
6	MM (R6)	51 tahun	Anggota Majelis Rakyat Papua Barat
7	AN (R7)	25 tahun	Aktivis KNPB
8	TG (R8)	23 tahun	Aktivis KNPB
9	BL (R9)	21 tahun	Aktivis KNPB
10	OG (R10)	23 tahun	Aktivis KNPB
11	UB (R11)	25 tahun	Aktivis KNPB
12	BR (R12)	63 tahun	Suku Doreri Pemilik Ulayat Pulau Mansinam
13	DM (R13)	68 tahun	Kepala Suku Arfak

Tabel 2. 2. Daftar Informan Kunci

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Partisipatif

Peneliti adalah orang asli Papua yang tinggal di Papua dan telah banyak melihat serta mengalami dinamika sosial dan politik yang berujung pada konflik yang terjadi di Papua. Terkait dengan observasi, informasi yang diperoleh merupakan hasil pengalaman peneliti sebagai orang asli Papua dalam mengamati berbagai fenomena konflik yang terjadi dalam era tahun 1990-an hingga awal reformasi dan berlanjut pada era otonomi khusus di Papua. Berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi tentunya menjadi bahan observasi bagi peneliti.

Salah satu bentuk pengamatan yang dapat dijelaskan adalah pengamatan terhadap fenomena konflik yang terjadi pada tahun 2019. Kerusuhan

yang terjadi di beberap wilayah di Papua pada tanggal 19 Agustus 2019 termasuk di Kota Manokwari adalah wujud dari dinamika konflik yang terjadi sebagai wujud dari pelecehan ras (etnis) yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Berdasarkan analisis pengamatan di lapangan, peneliti mendokumentasikan bahwa kejadian demonstrasi tersebut merupakan akibat dari bentrokan antar organisasi masyarakat di Surabaya dengan sejumlah mahasiswa Papua yang menempati asrama asrama Papua disana. Konfrontasi antara mahasiswa Papua dan kelompok organisasi masyarakat di Surabaya berlangsung pada tanggal 18 Agustus 2019. Selama peristiwa bentrokan, diucapkan pernyataan-pernyataan rasis oleh beberapa individu dari organisasi masyarakat tersebut terhadap mahasiswa Papua. Kejadian ini merupakan pemicu utama konflik yang berlangsung di berbagai wilayah di Papua pada tanggal 19 Agustus 2019.

Observasi lain yang dilakukan adalah menghadiri musyawarah adat yang berlangsung pada bulan Maret 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memilih wakil-wakil masyarakat adat sebagai representasi budaya adat dalam keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP). Selama musyawarah adat tersebut, peneliti mencatat adanya dinamika dalam proses pemilihan, di mana terjadi perbedaan persepsi mengenai klasifikasi suku-suku asli yang didasarkan pada struktur kekerabatan. Penentuan klasifikasi ini sangat penting untuk menjamin representasi yang adekuat dari tiap suku dalam struktur keanggotaan Majelis Rakyat Papua, sehingga bisa mencerminkan budaya adat masyarakat Papua.

b. Wawancara Mendalam

Pengambilan data dilakukan dengan memilih informan kunci berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini diawali dengan persiapan administratif yang meliputi pengurusan izin penelitian yang diajukan kepada pihak-pihak yang berwenang di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Jayawijaya. Setelah memperoleh izin, peneliti melanjutkan dengan melakukan komunikasi via telepon seluler untuk mengatur kesediaan waktu dan lokasi wawancara dengan para informan. Setelah penentuan waktu dan tempat telah disepakati, wawancara kemudian dilaksanakan. Metode wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan pertanyaan bebas terstruktur, memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih lanjut secara fleksibel berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh informan.

Proses wawancara yang dilakukan di Kabupaten Manokwari, peneliti tidak menghadapi hambatan signifikan dalam mencapai lokasi dan tempat pertemuan dengan para informan. Hambatan yang biasanya ditemui seperti jarak, masalah transportasi, atau biaya perjalanan, tidak menjadi masalah mengingat peneliti berdomisili di Manokwari sehingga memudahkan penanganan masalah-masalah tersebut. Peneliti memanfaatkan perekam suara dan buku catatan untuk mendokumentasikan dan mencatat informasi yang diberikan oleh responden pada saat melakukan wawancara. Dokumentasi berupa foto tidak mendapat izin dari informan dikarenakan kerahasiaan identitas mereka.

Proses wawancara yang dilakukan di Kabupaten Jayawijaya sangat berbeda dengan yang proses wawancara di Kabupaten Manokwari. Mengingat bahwa informan di Kabupaten Jayawijaya adalah aktivis masyarakat yang berbeda ideologi dengan ideologi Pancasila sehingga peneliti perlu berhati-hati untuk melakukan pendekatan. Kendala yang dihadapi adalah tempat tinggal informan yang terisolasi dan sering berpindah-pindah sehingga mereka sulit untuk ditemui. Informan juga sangat menjaga kerahasiaan identitas dan waktu serta tempat yang disepakati untuk melakukan wawancara. Proses wawancara dapat terlaksana karena peneliti dibantu oleh seorang teman yang memfasilitasi pertemuan antara peneliti dan informan. Peneliti memanfaatkan buku catatan untuk mendokumentasikan dan mencatat informasi yang diberikan oleh informan pada saat melakukan wawancara. Perekaman suara dan dokumentasi foto tidak dapat dilakukan karena tidak diizinkan oleh informan, dan pada saat wawancara dilakukan peneliti juga dilarang untuk membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun.

c. *Studi Literatur*

Proses pengumpulan data juga melibatkan pencarian literatur yang relevan dan menyediakan informasi yang sesuai untuk penelitian ini. Literatur tersebut meliputi buku-buku catatan sejarah yang ditulis oleh *Zendeling* (para misionaris gereja yang bekerja di Papua) serta arsip-arsip sejarah yang ditulis oleh *Ampteneer* Belanda di Papua. Informasi data yang bersumber dari literatur juga diperoleh dari tulisan-tulisan berupa opini, jurnal dan informasi lainnya yang terpublikasi melalui media elektronik.

No	Judul	Jenis Literatur	Penulis
----	-------	-----------------	---------

<i>Buku</i>			
1	Ajaib Di Mata Kita	Buku	F. C. Kamma
2	Koreri	Buku	F. C. Kamma
3	Kargoisme di Melanesia	Buku	John G. Strelan
4	Belanda di Irian Jaya	Buku	Pim Schoorl
5	Koreri	Buku	F. C. Kamma
6	Cita-Cita Koreri	Buku	Margaretha Hanita
7	Nasionalisme Ganda Orang Papua	Buku	Bernada Meteray
8	<i>The Languages and Linguistics of the New Guinea Area: A Comprehensive Guidenull.</i>	Buku	Palmer Bill
<i>Journal</i>			
1	<i>Research on human subjects: an historical overview</i>	Journal	Richard Gillespie
<i>Website</i>			
1	Lao-Lao » Media Pergerakan Rakyat Papua		
2	Situs Berita dan Informasi Seputar Tanah Papua – Suara Papua		
3	https://www.amnesty.org/		

Tabel 2. 3. Sumber Data Sekunder

7. Teknik Pengolahan Data

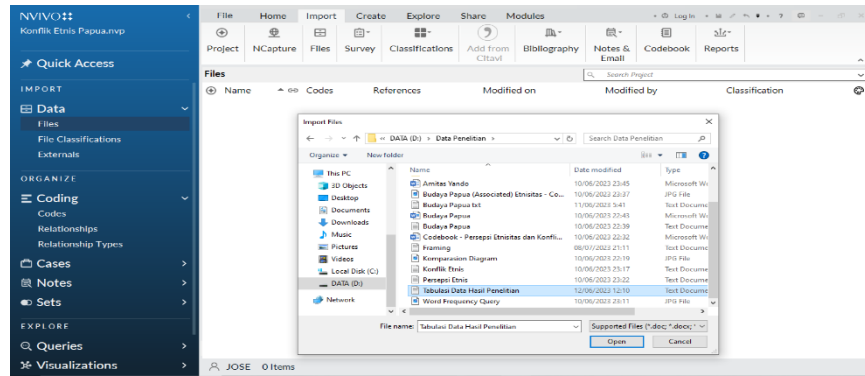
Data hasil observasi, wawancara dan studi literatur yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi teks. Informasi dalam bentuk narasi teks yang telah disusun selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenis informasinya. Informasi yang telah dikelompokkan selanjutnya ditarik kesimpulan untuk mendapat rangkuman informasi berdasarkan keterangan dari masing-masing informan sesuai pertanyaan penelitian sebagai dokumen dasar yang akan dianalisis menggunakan teknik "coding" melalui aplikasi Nvivo.

8. Analisis Data

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data menggunakan aplikasi Nvivo, adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan lembar kerja pada aplikasi Nvivo 13

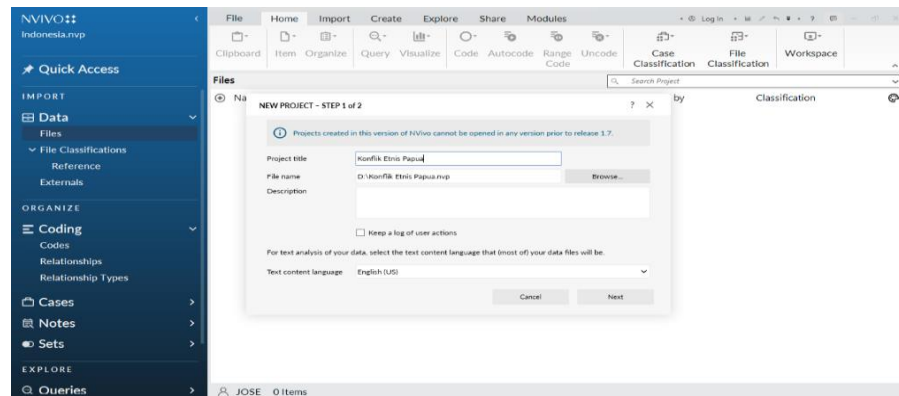
Sebelum memulai penginputan data, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan lembar kerja baru dalam aplikasi Nvivo. Hal ini meliputi penamaan proyek dan pemilihan folder untuk menyimpan hasil kerja.



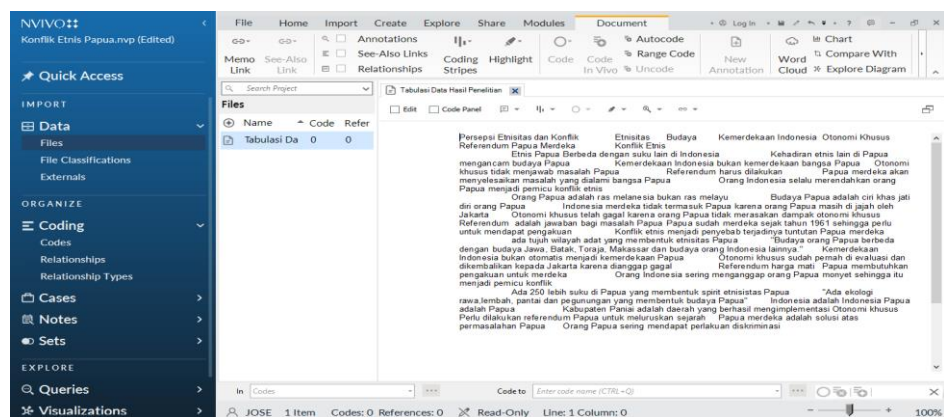
Gambar 2. 1. Pembuatan Lembar Kerja Aplikasi Nvivo

b. Import data

Selanjutnya, data yang sudah disiapkan kemudian diimpor ke dalam aplikasi Nvivo dalam format dokumen teks agar dapat diolah oleh aplikasi tersebut.



Gambar 2. 2. Proses Import Data kedalam Aplikasi Nvivo

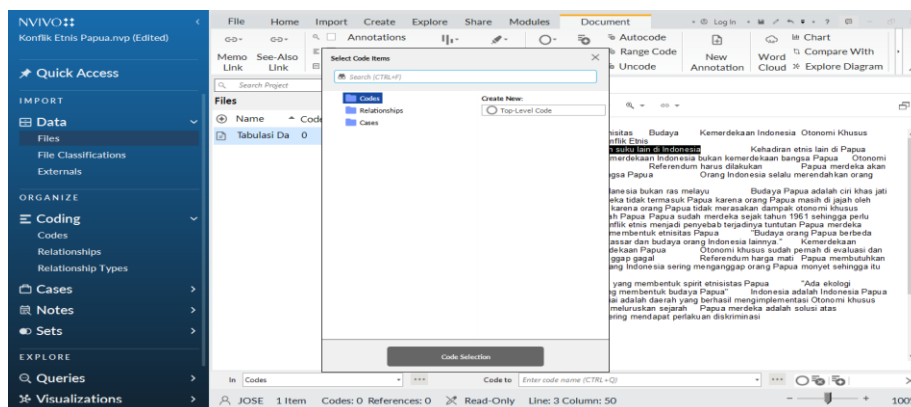


Gambar 2. 3. Tampilan Data txt. dalam Aplikasi Nvivo

c. Coddling data

Data atau informasi yang akan diolah harus terlebih dahulu dipilih, kemudian dilakukan proses coding dengan mengklik tombol coding yang tersedia pada

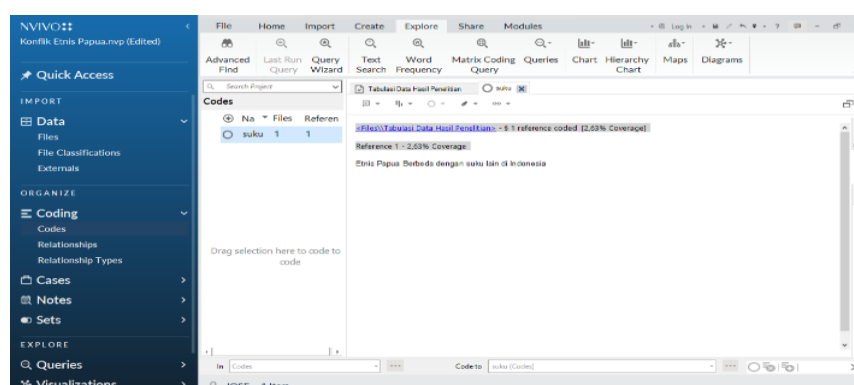
lembar kerja dalam aplikasi Nvivo 13. Setelah proses coding selesai, langkah berikutnya adalah mengategorikan jenis data yang telah diolah dengan memberikan label yang sesuai untuk memudahkan proses pencarian data yang telah terkode.



Gambar 2. 4. Tampilan Coding Data dalam Aplikasi Nvivo

d. Hasil analisis data

Data yang telah dikodekan adalah produk dari analisis data yang kemudian dapat ditampilkan dalam format visual seperti gambar, grafik, atau tabel. Temuan ini kemudian dapat diinterpretasikan dalam format naratif sebagai keluaran dari penelitian yang dapat disajikan.



Gambar 2. 5. Hasil Coding Data yang Ditampilkan dalam Aplikasi Nvivo

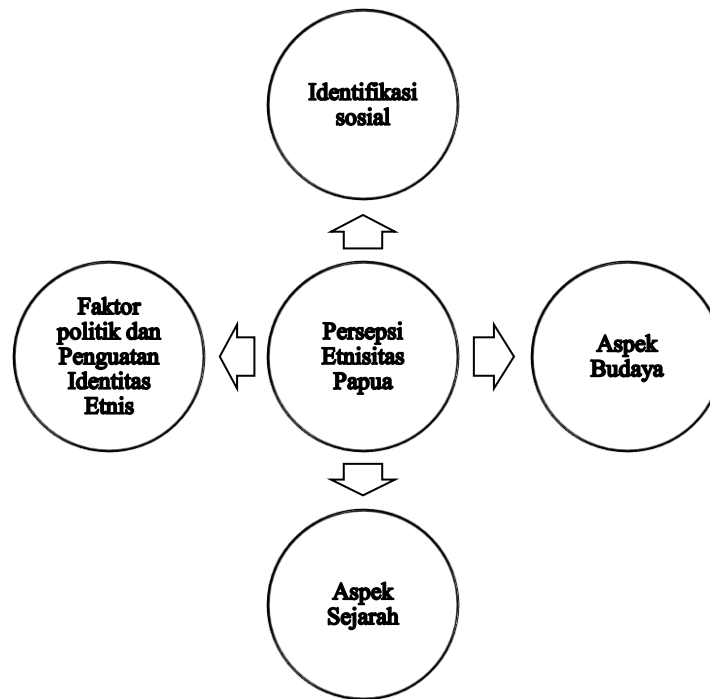
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Etnisitas dan Makna Kebebasan dalam Pandangan Masyarakat Papua

1.1. Persepsi Etnisitas Masyarakat Papua

Persepsi tentang etnisitas di Papua dibangun berdasarkan aspek nilai dan norma yang memiliki keterkaitan mendalam dengan prinsip-prinsip

fundamental yang dijadikan sebagai filsafat dalam kehidupan masyarakatnya. Penelitian ini menemukan bahwa pembentukan persepsi etnisitas masyarakat Papua berdasarkan beberapa aspek seperti tampak pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 6. Comparison Diagram Perpektif Etnisitas Papua

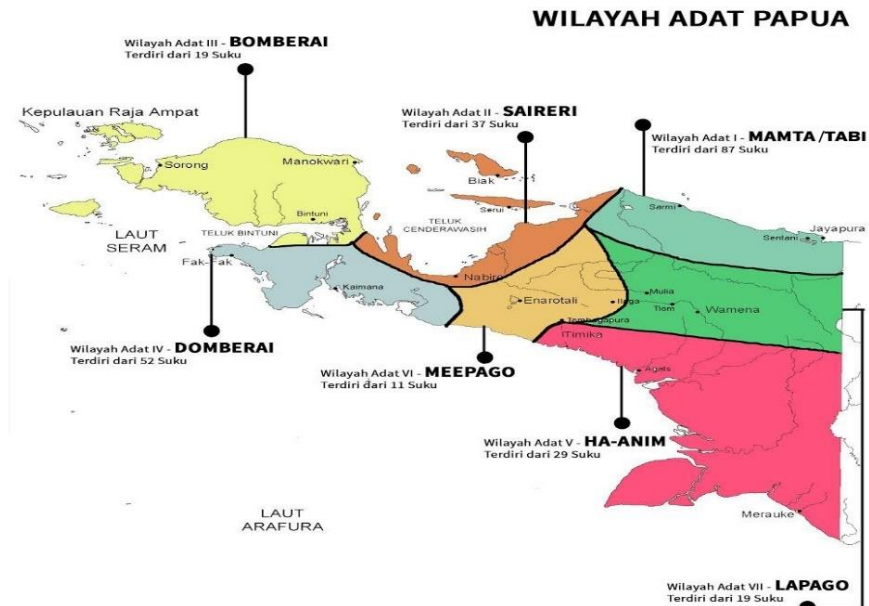
a. Identifikasi Sosial

code\\makna mebebasan\\identifikasi sosial
IMPORTANT DETAIL
wilayah adat
geografis

Tabel 2. 4. Hasil Analisis Data yang diperoleh dari Tanggapan Informan atas pertanyaan penelitian tentang Persepsi Etnisitas Masyarakat Papua

1) Wilayah adat

Tempat tinggal masyarakat Papua umumnya berbentuk dusun, yang merupakan kumpulan komunitas yang secara bersama-sama membentuk wilayah adat. Menuru (Mansoben, 1995) di Papua, terdapat tujuh wilayah adat yang telah dikategorikan berdasarkan persebaran kebudayaan yang mencakup Saireri, Anim Ha, Meepago, Lapago, Domberai, Bomberai, dan Doberai.



Gambar 2. 7. Peta Pembagian Wilayah Adat Papua
Sumber (Pemerintah Provinsi Papua, 2010)

Persebaran penduduk Papua berdasarkan ketujuh wilayah adat pada gambar 2 secara spesifik dapat dijelaskan pada table dibawah ini :

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten/Kota
I	Wilayah Adat Mamta	
1	Kota Madya Jayapura	Jayapura
2	Kabupaten Jayapura	Sentani
3	Kabupaten Kerom	Arso
4	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5	Kabupaten Mamberamo Raya	Bormeso
II	Wilayah Adat Saireri	
1	Kabupaten Biak Numfor	Biak
2	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
3	Kabupaten Kep. Yapen	Serui
4	Kabupaten Waropen	Botawa
5	Kabupaten Nabire	Nabire
III	Wilayah Adat Bomberai	
1	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
2	Kabupaten Manokwari	Manokwari
3	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
4	Kabupaten Pegunungan Arfak	Anggi
5	Kabupaten Teluk Wondama	Wasior
6	Kabupaten Sorong	Aimas
7	Kota Sorong	Sorong
8	Kabupaten Tambrau	Fef
9	Kabupaten Maybrat	Kmurkek

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten/Kota
10	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
11	Kabupaten Raja Ampat	Waisai
IV	Wilayah Adat Domberai	
1	Kabupaten Kaimana	Kaimana
2	Kabupaten Fakfak	Fakfak
V	Wilayah Adat Ha-Anim	
1	Kabupaten Merauke	Merauke
2	Kabupaten Bovendigoel	Tanah Merah
3	Kabupaten Asmat	Agats
4	Kabupaten Mappi	Kepi
5	Kabupaten Mimika	Timika
VI	Wilayah Adat Mee-Pago	
1	Kabupaten Paniai	Enarotali
2	Kabupaten Deyai	Tigi
3	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
4	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
VII	Wilayah Adat La-Pagago	
1	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
2	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
3	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
4	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
5	Kabupaten Puncak	Ilaga
6	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia
7	Kabupaten Tolikara	Karubaga
8	Kabupaten Yalimo	Elelim
9	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
10	Kabupaten Nduga	Kenyam

Tabel 2. 5. Pengelompokan Wilayah Adat Berdasarkan Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan

2) Geografis

Pembagian suku-suku berdasarkan geografis seperti yang ada saat ini di Papua secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Zona pesisir dan kepulauan meliputi wilayah yang signifikan di sepanjang pantai, yang dimulai dari pantai utara Pulau Papua dan berlanjut ke bagian barat dan selatan. Secara lebih spesifik, wilayah ini mencakup garis pantai yang melintasi berbagai lokasi seperti Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Teluk Wondama, Manokwari, Sorong, Tambrau, Fak-Fak, Kaimana, dan Merauke. Selain itu, zona ini juga mencakup beberapa pulau penting seperti Biak, Numfor, Supiori, dan Yapen.

- Zona dataran rendah mencakup berbagai area padang sabana yang luas, diantaranya adalah wilayah Asmat, Muyu, serta Lembah Kebar di Tambrau. Selain itu, terdapat juga Dataran Prafi di Manokwari dan Dataran Bomberai yang membentang antara Fak-Fak dan Kaimana.
- Wilayah yang mencakup zona rawa bakau dan sungai terdiri dari beberapa lokasi spesifik antara lain Mamberamo, Waropen, Sorong Selatan, Timika, Bovendigul, dan Teluk Bintuni serta hutan rawa sagu Segun dan Seget di Kabupaten Sorong.
- Dataran tinggi yang merupakan wilayah pegunungan mencakup Pegunungan Jayawijaya atau yang lebih dikenal dengan Pegunungan Tengah Papua, Puncak Cartenz dengan salju abadi, dan daerah-daerah disekitar kepala burung mulai dari Pegunungan Arfak hingga ke Maybrat

b. Aspek Budaya

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa aspek yang membentuk persepsi etnisitas berdasarkan aspek budaya.

code\persepsi etnis\faktor budaya\kebudayaan
IMPORTANT DETAIL
aspek bahasa
aspek kepercayaan
nilai dan norma sosial

Tabel 2. 6. Hasil Analisis Data yang diperoleh dari tanggapan informan atas pertanyaan tentang Persepsi Etnisitas Masyarakat Papua

1) Aspek Bahasa

Menurut Dr. Douglas Hayward, seorang ahli linguistik dari University of Hawaii, suku bangsa di Papua dapat dibagi berdasarkan keluarga bahasa mereka. Dia mencatat bahwa ada lebih dari 270 bahasa yang digunakan di Papua, yang dapat dibagi menjadi beberapa keluarga bahasa utama seperti Trans-New Guinea, West Papuan, dan East Papuan (Hayward, 1992). Menurut studi yang dilakukan oleh (Palmer Bill, 2017), bahasa-bahasa di Papua dapat diklasifikasikan ke dalam 37 bahasa yang berbeda, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

No	Klasifikasi Wilayah	Jumlah Bahasa	Nama Bahasa
1	Semenanjung Doberai/Semenanjung Bomberai	5 bahasa	1. Abun 2. Mpur 3. Maybrat 4. Mor 5. Tanah Merah (Sumuri)
2	Papua Barat Utara	12 bahasa	6. <u>Abinomn</u> 7. <u>Burmeso</u> 8. <u>Elseng</u> 9. <u>Kapauri</u> 10. <u>Kembra</u> 11. <u>Keuw</u> 12. <u>Kimki</u> 13. <u>Massep</u> 14. <u>Mawes</u> 15. <u>Molof</u> 16. <u>Usku</u> 17. <u>Yetfa</u>
3	Papua Barat Tengah	2 bahasa	18. Dem 19. Uhunduni
4	Sepik-Ramu	3 bahasa	20. Busa 21. Tayap 22. Yadë
5	Teluk Papua	8 bahasa	23. Dibiyaso 24. Kaki Ae 25. Kamula 26. Karami 27. Pawaia 28. Porome 29. Purari 30. Tabo
6	Kepulauan Bismarck	6 bahasa	31. Anêm 32. Ata 33. Kol 34. Kuot 35. Makolkol 36. Sulka
7	Pulau Rossel	1 bahasa	37. Yéli Dnye

Tabel 2. 7. Klasifikasi Bahasa di Papua Sumber : (Palmer Bill, 2017)

2) Aspek Kepercayaan

Sebelum agama-agama besar seperti Kristen Protestan, Katolik, dan Islam masuk ke Papua, setiap suku memiliki sistem kepercayaan tradisionalnya sendiri. Berdasarkan keterangan dari

responden 3 bahwa orang Papua umumnya percaya pada kekuatan roh halus, roh leluhur, atau dewa yang berkuasa di atas kekuatan lainnya. Misalnya, orang Biak Numfor memuja "*Manseren Nanggi*" sebagai dewa tertinggi, orang Moi menyebut "*Fun Nah*", dan orang Wandamen menyebut "*Syen Allah*". Agama tradisional ini timbul dari mitologi suku masing-masing, dan menjadi dasar bagi gerakan kargoisme yang juga berpengaruh hingga ke PNG, Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Salomon (Strelan, 1998).

3) Nilai dan Norma Sosial

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan 1 dan 6 nilai dan norma sosial yang menjadi prinsip budaya masyarakat Papua banyak didasari oleh "*kepemilikan tanah adat dan perkawinan*". Kedua aspek tersebut memiliki korelasi yang signifikan dengan pembentukan relasi sosial dalam masyarakat Papua.

- *Sistem kepemilikan tanah di Papua*, yang mengadopsi prinsip kepemilikan komunal. Kepemilikan komunal tanah adat di Papua, yang dikenal sebagai hak ulayat, erat kaitannya dengan prinsip pewarisan. Menurut (Rumansara, 2015) terdapat dua prinsip pewarisan pada orang Papua yaitu pewarisan berdasarkan garis keturunan ayah dan pewarisan berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu. Kepemilikan tanah ulayat, prinsip pewarisan di Papua berkaitan dengan penerus marga (*keret*) karena marga tersebut memiliki keterkaitan dengan dusun (tanah ulayat). Seorang anak akan mewarisi marga dari orang tuanya sehingga anak tersebut berhak untuk mewarisi tanah ulayat dari satu marga (*keret*). Satu keret biasanya terdapat beberapa marga yang memiliki pertalian darah baik itu pertalian darah dari ayah ataupun pertalian darah dari ibu. Sistem kepemilikan tanah yang terbagi didalam wilayah-wilayah adat tersebut telah membentuk relasi sosial dalam struktur adat yang dibangun berdasarkan hubungan kekeluargaan.
- *Hubungan kekerabatan* orang Papua terjalin melalui ikatan perkawinan karena didalam perkawinan ada prosesi adat yang wajib dilakukan. Proses adat yang dilakukan adalah berkaitan

dengan pembayaran mas kawin, walaupun hal ini juga berlaku bagi masyarakat lain di Indonesia. Perbedaan pembayaran mas kawin di Papua erat kaitannya dengan prosesi adat yang melibatkan seluruh *klan* atau keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan. Seluruh *klan* akan memberikan hartanya berupa benda adat yang dianggap sangat bernilai sebagai mas kawin. Pembayaran mas kawin ini akan mengikat seluruh keluarga besar menjadi satu keluarga.

c. Aspek Sejarah

Aspek pembentukan persepsi etnisitas, yang berakar pada sejarah, menunjukkan bahwa elemen-elemen historis memainkan peran penting dalam membentuk serta mempengaruhi persepsi terhadap etnisitas. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa aspek dalam sejarah yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi etnisitas yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

code\\persepsi etnis\sejarah
IMPORTANT DETAIL
pepera tahun 1969
gagasan pendirian negara papua
konflik bersenjata

Tabel 2. 8. Hasil Analisis Data yang diperoleh dari tanggapan informan atas pertanyaan penelitian tentang Persepsi Etnisitas Masyarakat Papua

Analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa berdasarkan pernyataan dari informan 1 hingga informan 6, terdapat tiga aspek historis yang signifikan berpengaruh terhadap pembentukan solidaritas etnis Papua. Ketiga aspek tersebut adalah PEPERA tahun 1969, ide pendirian negara Papua, serta konflik bersenjata. Point penting dari ketiga aspek ini yang menjadi tanggapan para informan 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah bahwa;

“Rasa persaudaraan itu ada karena orang Papua secara umum mengalami masalah yang sama yaitu penjajahan oleh Indonesia”.

Pernyataan ini tentunya sebagai tanggapan atas kompleksitas masalah yang muncul dari konflik bersenjata telah meningkatkan kesadaran kolektif mengenai isu-isu tersebut. Kesadaran kolektif yang muncul

kemudian berkembang menjadi rasa solidaritas etnis diantara sesama orang Papua. Solidaritas etnis yang berkembang di kalangan masyarakat Papua ini kemudian menyebabkan masyarakat mengidentifikasi dirinya menjadi sebuah identitas etnik yang distingtif, yang dipersatukan oleh kesamaan pengalaman sejarah mereka.

d. Faktor Politik dan Penguatan Identitas Etnis

Faktor politik dan penguatan identitas etnis di Papua meliputi berbagai aspek kebijakan pemerintahan serta pembangunan yang menempatkan masyarakat Papua dalam peran strategis. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi masyarakat asli Papua dalam semua aspek kehidupan politik dan pengembangan di wilayah tersebut. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penguatan politik dan identitas etnis di Papua dipengaruhi oleh beberapa aspek yang terangkum dalam tabel berikut.

code\persepsi etnisitas\faktor politik
IMPORTANT DETAIL
keterlibatan orang papua dalam politik pemerintahan
kebijakan otonomi khusus papua

Tabel 2. 9. Hasil Analisis Data yang diperoleh dari tanggapan informan atas pertanyaan penelitian tentang Persepsi Etnisitas Masyarakat Papua

Keterlibatan masyarakat Papua dalam dinamika politik pemerintahan serta implementasi kebijakan otonomi khusus memberikan kontribusi terhadap pembentukan persepsi atas etnisitas Papua. Menurut temuan dari wawancara dengan informan nomor 2, 7, 8, 9, 10 dan 11 teridentifikasi dua poin utama, yaitu adanya persepsi bahwa "*orang Papua sering mengalami diskriminasi verbal*". Meskipun tidak dijelaskan secara detail mengenai bentuk diskriminasi yang dihadapi, observasi yang dilakukan menunjukkan beberapa insiden rasis yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019 sebagai contoh spesifik dari masalah tersebut. Point yang kedua yang terdapat dalam table 2.9 berdasarkan pernyataan dari informan 2, 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah;

“otonomi khusus tidak menjawab masalah di Papua tapi justru menimbulkan persoalan-persoalan baru. Otonomi khusus membuat sesama orang Papua berkelahi untuk menuntut hak mereka”.

1.2. Makna Kebebasan Masyarakat Papua

Setiap manusia tentunya mengharapkan kebebasan yang hakiki sebagai hak dasar untuk hidup dan bekerja tanpa tekanan ataupun kekerasan. Setiap individu memiliki hak atas kehidupan, kesehatan, kebebasan, dan harta benda. Oleh karena itu, individu tersebut memiliki otoritas untuk menjaga dan melindungi kehidupannya sendiri, kesehatannya, kebebasannya, dan harta bendanya dari ancaman atau serangan dari individu lain. Upaya untuk melindungi hak-hak dasar merupakan pilihan bertanggung jawab yang diambil oleh setiap individu terhadap nilai-nilai fundamental dalam kehidupannya. Nilai-nilai fundamental dalam kehidupan manusia berkaitan dengan aspek-aspek penting yang dijadikan sebagai filosofi hidup. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman yang mengikat dalam bentuk nilai dan norma.

Kebebasan merupakan konsep yang memiliki arti universal, integratif terhadap berbagai nilai dan norma yang dijunjung oleh individu. Di Papua, kebebasan diinternalisasi sebagai bagian dari tradisi lokal, menunjukkan bagaimana nilai ini tidak hanya global namun juga dapat menyesuaikan dengan konteks budaya yang spesifik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa makna kebebasan Papua memiliki kaitan yang erat dengan adanya gerakan-gerakan kepercayaan tradisional yang ditunjukkan pada table di bawah ini.

code\\makna kebebasan\\kepercayaan tradisional
IMPORTANT DETAIL
koreri\\kepercayaan terhadap kebebasan

Tabel 2. 10. Hasil Analisis Data yang diperoleh dari tanggapan informan atas pertanyaan penelitian tentang Makna Kebebasan

Berdasarkan tanggapan informan 1 dan 3 terhadap pertanyaan tentang makna kebebasan bagi orang Papua, kata "*koreri*" paling sering disebutkan untuk mendefinisikan makna kebebasan. Berdasarkan pernyataan informan 3 dan 6 menemukan kalimat "*kami ingin bebas hidup dengan alam, bebas memiliki kehidupan sendiri*". Informasi ini menunjukkan adanya kaitan antara kepercayaan dan kehidupan bebas dengan alam, dimana didalamnya terkandung nilai dan norma yang membentuk struktur pengaturan dalam kehidupan mereka. Berdasarkan tradisi masyarakat Papua, khususnya di sekitar Teluk Cenderawasih hingga ke wilayah timur di bagian utara Papua, terdapat suatu gerakan kepercayaan yang dikenal sebagai *koreri*. Menurut F. K. Kama dalam catatan sejarah tentang *Koreri*, gerakan kepercayaan ini telah eksis jauh sebelum

perang dunia kedua dan masuknya ajaran agama Kristen di Papua. Gerakan kepercayaan ini telah menjadi bagian penting dari kepercayaan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan laporan dari para *Zendeling* GKI di Tanah Papua, juga di temukan beberapa catatan mengenai gerakan-gerakan kepercayaan orang Papua terhadap kepercayaan *koreri*. Sebuah pernyataan yang dikutip dari F. C. Kamma seorang guru Injil Belanda dalam catatan sejarah Ajaib di Mata Kita terkait dengan kepercayaan *koreri* adalah sebagai berikut :

Kepercayaan *koreri*, yang berasal dari tradisi lisan dan mitologi suku-suku asli Papua, mengandung harapan akan kedatangan zaman baru; suatu periode di mana orang Papua akan bebas dari penindasan dan eksploitasi. Kata *koreri* dalam bahasa Biak telah mewakili hampir beberapa jenis kepercayaan suku di Papua yang memiliki arti yang sama dengan kepercayaan yang percaya pada situasi yang akan dipulihkan karena seseorang yang dianggap sebagai "penyelamat" yang akan datang ketika saatnya tiba.

Konsep kebebasan, yang pada awalnya dipersepsikan sebagai bentuk kepercayaan, telah ada jauh sebelum pengaruh modernisasi mempengaruhi masyarakat Papua. Dalam era pra-modernisasi, kebebasan diinterpretasikan melalui pelaksanaan beragam tradisi dan ritual yang erat kaitannya dengan alam. Dalam pelaksanaan ritual-ritual adat yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut, berdasarkan catatan sejarah F. C. Kamma, dijelaskan bahwa;

Tokoh-tokoh dalam kepercayaan ini mengambil peran setengah dewa karena mereka cenderung menghubungkan penemuan kembali rahasia kehidupan dan kematian dengan leluhur. Tokoh-tokoh mistik ini dapat membawa semua pengikut mereka ke keadaan kehidupan di suatu tempat dengan menyatukan apa yang terpisah dan perubahan serta penyerahan segala sesuatu kepada tatanan kekal.

Pada dasarnya didalam kerpercayaan "*koreri*" juga mengenal tokoh atau figur yang diayikini memiliki kekuatan magis yang dapat menuntun pengikutnya untuk mencapai kebebasan yang di cita-citakan. Berdasarkan hasil olah data, juga ditemukan pernyataan informan 1 bahwa "*pemimpin itu orang yang berwibawa karena memiliki pengaruh dan punya kekuatan*". Informasi ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keyakinan/kepercayaan akan kebebasan yang diyakini oleh

mereka. Kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat bertindak sebagai pemberi nasihat mengenai kewajiban-kewajiban adat serta sesajian yang disampaikan kepada roh leluhur. Pada dasarnya, kepercayaan ini berpangkal pada asumsi bahwa segala petunjuk atau arahan menuju kebebasan bersumber dari arahan roh nenek moyang. Berdasarkan kepercayaan ini, pemimpin bertindak sebagai individu yang dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh nenek moyang, yang mana mereka ini memberikan arahan kepada para pengikutnya.

2. Penguatan Persepsi Etnisitas Terhadap Makna Kebebasan (Politisasi Makna Kebebasan sebagai Kemerdekaan Papua)

2.1. *Bentuk Penguatan Etnisitas Papua*

Penguatan etnisitas Papua merupakan aspek yang bersumber dari empat aspek yang telah dibahas dalam point sebelum menggambarkan bahwa etnisitas Papua dipengaruhi oleh aspek identifikasi sosial, aspek budaya, sejarah dan aspek penguatan identitas etnis. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa penguatan identitas etnis Papua adalah merupakan politik identitas yang dijalankan oleh kolonial Belanda sebagai upaya dalam mempersiapkan rencananya untuk menjadikan Papua sebagai wilayah kolonisasinya.

code\\makna mebebasan\\makna kebebasan
IMPORTANT DETAIL
budaya papua adalah ciri khas jati diri orang papua

Tabel 2. 11. Hasil Analisis Data yang diperoleh dari tanggapan informan atas pertanyaan penelitian tentang Makna Kebebasan bagi Masyarakat Papua

Dalam analisis data yang dilakukan, informan 1 mengungkapkan bahwa ada dua hal yang menjadi kesamaan dalam budaya orang Papua;

“Orang Papua memiliki kesamaan dalam hal budaya dan adat istiadat. Dalam budaya Papua ada dua hal yaitu tifa dan nyanyian. Tifa itu digunakan sebagai media yang penting dalam upacara-upacara dan rutual-ritual adat. Sedangkan nyanyian itu sebagai ungkapan jiwa terhadap tanah Papua dan kedekatan jiwa dengan alam, nyanyian juga bisa berupa tangisan. Didalam nyanyian, tifa menjadi alat untuk mengiringi nyanyian”. Orang Papua adalah ras Melanesia yaitu kulit hitam dan rambut keriting.

Ketiga hal tersebut yakni tifa dan nyanyian dan ciri-ciri fisik, menonjol sebagai kesamaan yang signifikan dalam budaya orang Papua dan selanjutnya berkembang menjadi instrumen penting dalam pembentukan

identitas etnis. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan 1, 2, 3 dan 4, dapat disimpulkan bahwa;

Lagu-lagu yang dinyanyikan dengan diiringi tifa sering kali bermakna tangisan, ungkapan isi hati serta ungkapan keindahan alam tanah Papua yang dinyanyikan setelah berbagai gejolak dan konflik yang terjadi mulai membangkitkan rasa solidaritas dan identitas etnis.

2.2. Upaya-Upaya Pemaknaan Kebebasan Masyarakat Papua

Pemaknaan kebebasan masyarakat Papua dalam kehidupannya dilakukan dalam cara yang unik yaitu dilakukan dalam bentuk nyanyian. Secara umum lagu adalah bagian dari ekspresi manusia terhadap sesuatu yang berkenan atau dianggap penting dan memberikan makna bagi kehidupannya. Masyarakat Papua mewujudkan pemaknaan kebebasan yang didambakannya dalam bentuk nyanyian jiwa dalam memaknai tanah dan sumber daya alam yang ada diwayahnya. Salah satu lagu yang cukup terkenal adalah lagu Papua yang saat ini ditetapkan sebagai lagu wajib yang dinyanyikan dalam acara-acara resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Lagu tersebut berjudul "Tanah Papua" yang liriknya adalah sebagai berikut :

Di sana pulauku
Yang kupuja s'lalu
Tanah Papua, pulau indah
Hutan dan lautmu
Yang membisu s'lalu
Cendrawasih, burung emas
Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri
Kan kupuja selalu keindahan alammu yang mempesona
Sungaimu yang deras mengalirkan emas
Sio ya Tuhan, terima kasih

Lagu ini mengisahkan Pulau Papua yang indah dan kaya akan sumber daya alam yang dimana tempat orang Papua tinggal dan bersatu dengan lingkungan alamnya. Lagu ini secara tradisional dinyanyikan dengan pukulan tifa dan diiringi dengan gitar dan akulele. Menurut pernyataan dari informan 2 menyatakan bahwa :

Upacara-upacara adat orang Papua itu biasa dipenuhi dengan nyanyian ritual untuk mengekspresikan kebebasan dan kemerdekaan yang datang dalam lagu maupun bagi orang-orang yang bernyanyi.

Berdasarkan pernyataan Arnold Ap seorang musisi legendaris yang dikutip dari laolaopapua.com menyatakan bahwa :

”Menyanyi untuk hidup”, ini adalah upaya totalitas ekspresi dan budaya dalam bernyanyi, termasuk didalamnya menari dan bermain musik sebagai upaya tak terpisahkan dengan kebebasan.

Arnold Ap adalah seorang musisi Papua yang tergabung didalam group musik legendari Papua dengan nama *mambesak group*. Group musik ini adalah merupakan group musik pioner asal Papua yang menggaungkan lagu-lagu Papua dengan mengangkat identitas etnis dan seni budaya Papua pada era 1970 – 1980-an. Lagu-lagu yang dinyanyikan kerap kali bernuansa politik dalam mengkritik kehadiran Pemerintah Indonesia yang sedang dalam upaya mengkonsolidasikan kekuasaannya di Papua. Bagi masyarakat Papua nyanyian, musik dan tarian tradisional merupakan ungkapan hati nuraninya. Ada nyanyian yang dinyanyikan saat sedih maupun gembira ataupun lagu yang dinyanyikan saat kalah ataupun menang.

2.3. Upaya Penguatan Kebebasan Etnis Papua (Politisasi Makna Kebebasan Masyarakat Papua sebagai Makna Merdeka)

Kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Papua dalam konteks kebebasan awalnya tidak dirumuskan dalam frasa "merdeka" sebagai suatu tujuan tertentu. Konsep kebebasan dalam konteks kepercayaan ini adalah interpretasi murni dari keyakinan yang mereka anut. Kepercayaan ini telah eksis dalam masyarakat dan mengalami perkembangan jauh sebelum interaksi masyarakat Papua dengan orang-orang dari luar wilayah mereka. Berdasarkan hasil analisis data, terdapat kesamaan makna antara kepercayaan masyarakat Papua mengenai kebebasan dengan penggunaan istilah "merdeka". Secara *defacto* Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dan telah sah menjadi bagian dari bangsa Indonesia, namun masyarakat Papua masih merasa belum secara penuh merdeka (bebas) dari penjajahan. Gambar dibawah ini menunjukkan frekwensi kata yang paling sering muncul dari tanggapan informan atas pertanyaan terkait makna kebebasan dalam pandangan mereka.

Gambar 2. 8. Frequency Word Query Makna Kebebasan

”Indonesia merdeka tidak termasuk Papua karena orang Papua masih di jajah oleh Jakarta”.

”kemerdekaan Indonesia bukan kemerdekaan bangsa Papua” dan ”kemerdekaan Indonesia tidak otomatis menjadi kemerdekaan Papua”.

Persepsi ini sesungguhnya muncul dari proses politisasi terhadap konsepsi kebebasan dalam pandangan masyarakat Papua yang telah berlangsung sejak dekade 1960-an oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan di wilayah Papua. Proses politisasi tersebut menghasilkan suatu paradigma baru bagi masyarakat Papua dalam memahami arti dari kemerdekaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan 9, 10 dan 11 bahwa:

”Papua sudah merdeka sejak tahun 1961 sehingga perlu untuk mendapat pengakuan”.

Pemaknaan kata merdeka terus mengalami perkembangan sejak saat itu hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang selalu terjadi antara masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia. Orang Papua merasa tidak berada dalam keadaan merdeka seperti yang diharapkan, hal ini diungkapkan dalam hasil analisis dari pernyataan informan 8, 9, 10 dan 11 bahwa:

”Papua merdeka akan menyelesaikan masalah yang dialami bangsa Papua”.

Selain itu, berdasarkan observasi atas beberapa demonstrasi yang berlangsung di Kota Manokwari, teridentifikasi bahwa salah satu tuntutan utama para demonstran adalah permintaan untuk referendum di Papua. Tuntutan ini muncul dengan tujuan untuk mengklarifikasi sejarah, di mana dinyatakan bahwa negara Papua telah terbentuk sejak tahun 1961.



Gambar 2. 9. Foto Demonstrasi Mahasiswa Papua

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah diplomatik dalam menawarkan solusi terhadap berbagai tuntutan yang berkaitan dengan politisasi makna kebebasan yang dikemukakan oleh masyarakat Papua, sebagaimana terrefleksi dalam paket kebijakan otonomi khusus. Pada tahun 2001, selama periode kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, Pemerintah Indonesia menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Pengesahan undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah Provinsi Papua dalam mengatur dan mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Paket kebijakan otonomi khusus yang telah mendapatkan persetujuan akan berlaku

selama periode dua puluh tahun. Setelah jangka waktu tersebut, akan dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau tidak.

Pada tahun 2021, yang menandai dua puluh tahun sejak implementasi otonomi khusus, telah dilakukan evaluasi oleh berbagai pihak terkait untuk menilai keberhasilan dan kelangsungan kebijakan tersebut. Menurut hasil evaluasi yang dirilis oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) pada waktu itu, pelaksanaan otonomi khusus tidak berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan awal pemberlakuan kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi khusus tersebut turut mempengaruhi pemaknaan kata merdeka dalam konotasi sebagai kebebasan bahwa otonomi khusus tidak memberikan dampak terhadap orang Papua. Informan 2 dalam pernyataan menyampaikan bahwa :

”Otonomi khusus telah gagal karena orang Papua tidak merasakan dampak otonomi khusus”

Sekali lagi, pemahaman tentang hakikat kebebasan yang diidamkan oleh masyarakat Papua terus mengalami perubahan dalam konteks dinamika politik yang ada. Interpretasi dari kebebasan dalam konteks politis, yang terwakili dalam istilah "merdeka", secara berkesinambungan membentuk paradigma baru bagi masyarakat Papua, yang bergantung pada konteks serta fenomena sosial dan politik yang sedang berkembang di wilayah tersebut. Contoh dari fenomena terkini adalah terkait dengan penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana interpretasi kebebasan dalam hal ini adalah bahwa kebijakan otonomi khusus seharusnya memberikan peluang yang lebih luas bagi orang Papua untuk diangkat menjadi ASN. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan 2 yang menyatakan bahwa:

”Kabupaten Paniai adalah daerah yang berhasil mengimplementasi Otonomi khusus”

Artinya bahwa makna dari kebebasan atau kemerdekaan yang sesungguhnya terletak pada kesamaan hak semua orang Papua, tanpa memandang tingkat kecerdasan mereka dalam seleksi Aparatur Negeri Sipil (ANS), yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Permasalahan ini bukan sekedar tentang kecerdasan melainkan tentang politisasi keyakinan yang diwujudkan dalam gagasan otonomi khusus.

3. Perkembangan Pemaknaan terhadap Kebebasan

Persepsi tentang kebebasan di kalangan masyarakat Papua telah mengalami evolusi sejak menjadi bagian resmi dari Indonesia. Transformasi nilai ini mencerminkan perubahan makna kebebasan yang berbeda di setiap periode. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, terungkap bahwa persepsi tentang kebebasan telah mengalami perubahan signifikan di kalangan masyarakat Papua pasca proses modernisasi. Proses ini tidak hanya merupakan transformasi struktural, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial serta konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

code\\makna mebebasan\\makna kebebasan
IMPORTANT DETAIL
pengakuan penuh terhadap hak-hak asasi manusia
pengakuan atas hak atas tanah dan sumber daya alam
pengakuan untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya
pengakuan berpartisipasi penuh dalam proses politik dan pembangunan ekonomi
pengakuan pembebasan dari ketidakadilan struktural dan diskriminasi rasial

Tabel 2. 12. Hasil Analisis Data yang diperoleh dari tanggapan informan atas pertanyaan penelitian tentang Makna Kebebasan bagi Masyarakat Papua

Dinamika sosial dan konflik yang berlangsung di Papua telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan warga setempat. Menurut data yang disajikan dalam tabel 2.12 yang terlampir, makna kebebasan yang diharapkan oleh masyarakat Papua merupakan aspirasi mereka terhadap konsep kebebasan yang diyakini. Pada urutan teratas dari harapan ini adalah pengakuan atas hak asasi manusia, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Selanjutnya, pengakuan terhadap hak atas tanah adat dan sumber daya alam menjadi prioritas lain dalam konsepsi kebebasan yang diharapkan. Pengakuan ini juga mencakup kebebasan untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya masing-masing. Ketiga aspek tersebut sangat kental dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Papua mengenai kebebasan, sesuai dengan keyakinan yang telah ada sejak masa lalu. Pengakuan terhadap partisipasi penuh dalam proses politik dan pembangunan ekonomi, serta pembebasan dari ketidakadilan struktural dan diskriminasi rasial, merupakan nilai-nilai kebebasan yang muncul setelah serangkaian dinamika sosial dan konflik yang terjadi di Papua.

Pemahaman tentang kebebasan yang dianut oleh masyarakat seringkali muncul sebagai respons terhadap gejolak sosial serta konflik yang berkecamuk, yang

pada gilirannya menjadi pijakan bagi terbentuknya kesadaran sosial mengenai isu-isu yang tengah dihadapi di Tanah Papua. Kesadaran sosial yang berkembang sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Papua, telah membentuk identitas etnis yang menjadi manifestasi dari solidaritas orang Papua. Solidaritas yang diperlihatkan oleh masyarakat Papua telah melahirkan identitas ke-Papuaan, yang saat ini diakui dengan istilah orang asli Papua.

4. Pandangan Orang Papua terhadap Etnis Lainnya

Masyarakat di Papua umumnya memiliki persepsi identitas sosial yang berbeda dari orang non-Papua. Mereka menggunakan istilah "*komen*" untuk mendeskripsikan diri mereka sendiri, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Orang Asli Papua (OAP). Di sisi lain, orang non-Papua sering disebut sebagai "*amber*", terminologi yang secara khusus mengacu pada individu dengan ciri-ciri fisik berkulit sawo matang dan rambut lurus. Lebih lanjut, istilah "*amber*" berdasarkan tanggapan informan 12 berasal dari kata dalam bahasa Biak yang disebut "*amberi*" juga mengandung konotasi sebagai orang yang terpelajar dan dihormati dalam masyarakat.